

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL
SEKRETARIAT DEPUTI**

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.02/101/D.III.M.EKON.1/02/2026

Yth. : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Dari : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital
Hal : Permohonan Persetujuan Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025
Tanggal : 18 Februari 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas (ND) dari Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor AK.03.01/38/SET.M.EKON.01/02/2026 tanggal 3 Februari 2026 hal Permohonan Penyusunan LAKIP Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan draft LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital (D3) Tahun 2025 yang **telah disusun bersama** seluruh unit kerja eselon 2 lingkup D3 dan terakhir pada rapat finalisasi tanggal 11 Februari 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Deputi tidak berpendapat lain, **mohon perkenan Bapak untuk menandatangani draft terlampir** (batas akhir pengumpulan dokumen final pada **akhir Februari 2026**).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Deputi diucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputi,



drh. Pujo Setio., M.Si.
NIP 196806051994031004

Tembusan Yth.:

1. Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;
2. Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional;
4. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital;
5. Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan.



KEMENTERIAN KOORINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Caya, Adaptif, Kolaboratif



KEMENKO PEREKONOMIAN

20
25

LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian



KATA PENGANTAR



+62 858-7678-9333



sesdep3@ekon.go.id



@niaga_ekodig



www.ekon.go.id

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai salah satu pertanggungjawaban Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital dalam rangka pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital mengemban amanah dalam pencapaian 6 (enam) sasaran program, yaitu (i) Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan; (ii) Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas; (iii) Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan; (iv) Terwujudnya Kebijakan Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas; (v) Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas; dan (vi) Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas.

Kami bersyukur bahwa Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital berhasil memperoleh Nilai Kerja Organisasi dengan status telah memenuhi ekspektasi pada tahun 2025. Capaian tersebut tentunya merupakan kontribusi bersama seluruh pegawai pada Kedeputan Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri serta hasil koordinasi bersama dengan K/L dan stakeholder terkait.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital. Kami berharap hasil capaian kinerja tahun 2025 dapat menjadi bahan evaluasi agar dapat mencapai yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2026

Deputy Bidang Koordinasi
Perdagangan dan Ekonomi Digital



Ali Murtopo Simbolon

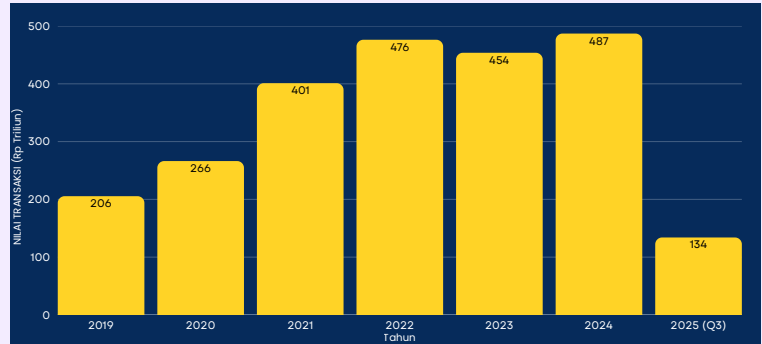


DATA TRANSAKSI E-COMMERCE INDONESIA (2019-2025)



NILAI TRANSAKSI

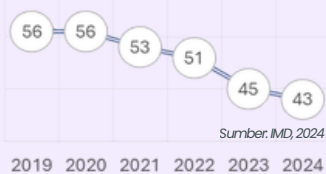
Nilai transaksi e-commerce di Indonesia meningkat tajam dari sekitar Rp 205,5 triliun pada 2019 menjadi Rp 401,1 triliun di 2021 (pertumbuhan +50,7 %), kemudian melambat menjadi Rp 476,3 triliun pada 2022 (+18,7 %), sedikit turun menjadi Rp 453,75 triliun di 2023 (-4,7 %), dan kembali naik ke Rp 487,01 triliun pada 2024 (+7,3 %) mencerminkan lonjakan di masa pandemi, fase stabilisasi, kemudian pemulihan moderat.



Sumber: Bank Indonesia, 2025

ANALISIS TREN & FAKTOR PENDORONG

1 | WORLD DIGITAL COMPETITIVE RANKINGS



Peringkat daya saing global Indonesia meningkat dari peringkat 56 Tahun 2019 menjadi 43 Tahun 2024

NB. Number Range: 1-100. The smaller the number, the more Indonesia's global competitiveness is increasing

Global Innovation Index 2024



Target Indonesia 2030: Menempati Peringkat 45 dalam Global Innovation Index (sejalan dengan target RPJN)

UNESCO



Indonesia menjadi Negara Pertama di kawasan ASEAN yang berhasil menyelesaikan Penilaian Artificial Intelligent (AI) Readiness Assessment using UNESCO's Readiness Assessment Methodology (RAM)

East Venture Digital Competitiveness Index 2025



Selama lima tahun, daya saing digital Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan. Skor EV-DCI 2024 meningkat sebesar 35,5% dari 27,9 pada tahun 2020 menjadi 38,1 pada 2024

Cybersecurity Index 2024



Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dalam Tier 1 - Role-modelling dengan score of 85-100 dalam Global Cybersecurity Index 2024

Govt AI Readiness Index 2024



Indonesia menempati peringkat 33 dari 188 negara secara global dalam Government AI Readiness Index 2024 menurut laporan resmi Oxford Insights

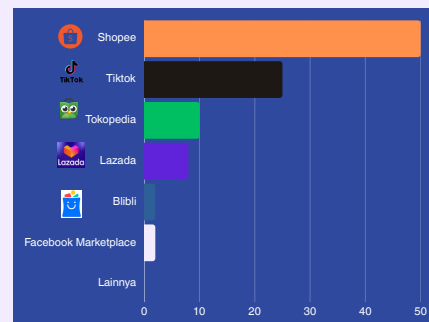
QI4SD Index



Indonesia naik dari peringkat ke-34 ke-28 dalam Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index 2024 yang dirilis oleh UNIDO.

3 | DOMINASI PLATFORM DAN PERILAKU KONSUMEN

PETA PERSAINGAN PLATFORM



Shopee masih mendominasi sebagai platform e-commerce paling sering diakses di Indonesia, disusul oleh TikTok Shop, Tokopedia, dan Lazada (APJII, 2025).

PERILAKU BELANJA KONSUMEN

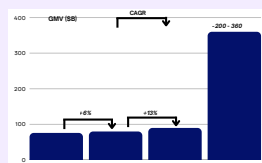
Sebanyak 30,34% responden berbelanja online beberapa kali dalam sebulan, dan 14,78% melakukannya beberapa kali dalam seminggu. Belanja online kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.



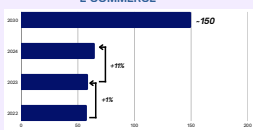
2 | POTRET EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

PROFIL EKONOMI DIGITAL INDONESIA

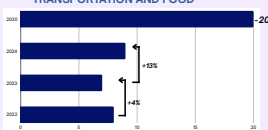
- Pada tahun 2024, sekitar 34% pangsa pasar ekonomi digital ASEAN akan berada di Indonesia.
- Pada tahun 2030, ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 360 miliar (GMV).



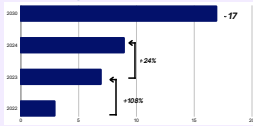
E-COMMERCE



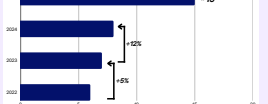
TRANSPORTATION AND FOOD



ONLINE TRAVEL



ONLINE MEDIA



4 | INOVASI PERDAGANGAN: VIDEO & SOCIAL COMMERCE

Live commerce menjadi pendorong utama pertumbuhan e-commerce pada 2024.

80% konsumen tertarik menonton live shopping.

60% merasa pengalaman ini mirip dengan belanja langsung di toko.

Kategori fashion tumbuh paling pesat, dengan peningkatan pesanan hingga 82% pada kuartal III 2025.



STRATEGI NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF

Inklusi Keuangan Tahun 2025-2045

Secara Nasional Pada RPJPN Tahun 2025 - 2045

Pada 13 September 2024, telah disahkan oleh Undang-Undang No.59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045

Dalam RPJPN, Sektor keuangan yang kondusif diperlukan untuk memastikan optimalnya fungsi intermediasi guna mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, **kebijakan sektor keuangan diarahkan** melalui:

1 Pendalaman Sektor Keuangan

2 Penguatan peran intermediasi sektor keuangan

3 Penguatan basis sumber pendanaan dan peran sektor keuangan non bank

4 Inklusi keuangan

5 Penguatan inovasi dan pemanfaatan digitalisasi keuangan

6 Pelindungan konsumen dan investor sektor keuangan

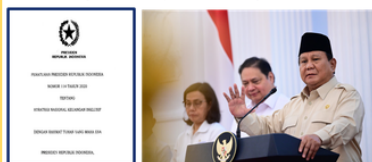
Target Dalam Arah (Tujuan) Pembangunan Ekonomi Makro

Arah Pembangunan	Indikator	Sasaran 2025*	Sasaran 2045
Stabilitas Ekonomi Makro	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	• Aset Perbankan/PDB (%)	66,9	200
	• Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,0	60
	• Aset Asuransi/PDB (%)	9,1	20
	• Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	57,8	120
	• Total Kredit/PDB (%)	37,8	80-90
	34. Inklusi Keuangan (%)	91	98

*Baseline tahun 2025 merupakan proyeksi target

Arahan Presiden RI: Setiap keluarga harus memiliki rekening keuangan formal

Inklusi keuangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhannya serta bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) merupakan implementasi dari Peraturan Presiden 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

 Presiden RI selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif memberikan arahan:

1. Kepemilikan rekening berbasis keluarga untuk penyaluran program pemerintah agar tepat sasaran

Ratas 21 Maret 2025

Tujuan SNKI

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Mempercepat penanggulangan kemiskinan
3. Mengurangi kesenjangan antarindividu



Target Keuangan Inklusif

Kenaikan tingkat indeks inklusi keuangan sebesar 98%

(1) Peningkatan akses layanan keuangan format; (2) Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen; (3) Perluasan jangkauan layanan keuangan digital; (4) Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan kecil; (5) peningkatan produk dan layanan keuangan digital; (6) Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital



Literasi dan inklusi keuangan terus meningkat, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum menjangkau layanan keuangan formal



Kategori	Sub Kategori	Tk. Inklusi (2024) ¹
Jenis Kelamin	Laki-Laki	92.6%
	Pemampuan	92.9%
Wilayah	Perkotaan	94.5%
	Pedesaan (dan 3T)	90.0%
Produk Perbankan	Konvensional	92.6%
	Syariah	13.4%
Demografi	15-17 tahun	91.3%
	18-25 tahun	95.1%
	26-35 tahun	93.5%
	36-50 tahun	94.1%
	51-79 tahun	89.7%

1. Sumber: DMS; 2. Sumber: GEM

Legenda: ■ Nilai terdapat Rendah ■ GEM

Peningkatan Keuangan Inklusif Didukung Oleh Berbagai Program Kelompok Kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif



KEMENTERIAN/LEMBAGA ANGGOTA DEWAN NASIONAL KEUANGAN INKLUSIF (DNKI)



Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jl Lapangan Banteng Utara No 1, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10710
Email : sekretariat@snki.go.id
Website : snki.go.id



PERISTIWA PENTING 2025

Dialog Kinerja Internal Deputi III dalam Rangka Konsolidasi SDM, Program dan Kegiatan 2025

9 Januari 2025





PERISTIWA PENTING 2025

Rapat Koordinasi Internal Pokja Data dan Informasi (Media dan Publikasi) Deputi III bersama Biro KLIP



13 Februari 2025





PERISTIWA PENTING 2025

28 Februari 2025



Dialog Kinerja bersama seluruh Pegawai Deputy III



PERISTIWA PENTING 2025

25 April 2025



**Integrasi Data Kependudukan dan Identitas
Kependudukan Digital (IKD), Dukung Kebijakan Ekonomi
Digital dan Inklusi Keuangan**



PERISTIWA PENTING 2025

27 Mei 2025



**Dukungan Terminal Peti Kemas terhadap
Pengembangan Dashboard Kinerja Logistik Nasional**



PERISTIWA PENTING 2025

26-27 Mei 2025



Pelaksanaan Workshop Quantum Computing dan
Quantum Safe berkolaborasi dengan IBM



PERISTIWA PENTING 2025

Dukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital, Pemerintah
Dorong Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

02 July 2025





PERISTIWA PENTING 2025

04 July 2025



Himpun Masukan Konstruktif dari Berbagai Stakeholders, Pemerintah Gelar Meaningful Participation Rperpres Penguatan Logistik Nasional



PERISTIWA PENTING 2025

25 July 2025



**Tingkatkan Kapasitas Pengambilan Kebijakan Berbasis
Data, Kemenko Perekonomian Gelar Workshop Tim
Analisis Data**



PERISTIWA PENTING 2025

30 Juli 2025



Perkuat Reformasi Birokrasi, Deputy Perdagangan dan
Ekonomi Digital Dorong Akselerasi Zona Integritas



PERISTIWA PENTING 2025

31 July 2025



**Perkuat Fondasi Literasi dan Inklusi Keuangan,
Kemenko Perekonomian Gelar RPP Komnas LIK**



PERISTIWA PENTING 2025

06 Aug 2025



Pemerintah Percepat Penyelesaian Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional Melalui Diskusi Kelompok Terpumpun



PERISTIWA PENTING 2025

29 Agst 2025



Pemerintah Luncurkan Program PINTAR untuk Perkuat
Inklusi Keuangan Desa



PERISTIWA PENTING 2025

08 Sept 2025



Dukung Produk Lokal dan UMKM,
Pemerintah Kembali Persiapkan Progam Harbolnas



PERISTIWA PENTING 2025

08 Sept 2025



Hadiri Tanam Perdana Kentang Industri,
Kemenko Perekonomian Dukung Pengembangan
Rantai Pasok Bahan Baku Lokal



PERISTIWA PENTING 2025

07 Oct 2025



**ASEAN Digital Economy Framework Negotiating
Committee Meeting: Komitmen ASEAN Mempercepat
Pertumbuhan Ekonomi Digital di Kawasan**



PERISTIWA PENTING 2025

25 Nov 2025



Kemenko Perekonomian Dorong Optimalisasi Layanan VAT Refund Untuk Perkuat Program Belanja di Indonesia Aja (BINA)



PERISTIWA PENTING 2025

04 Dec 2025

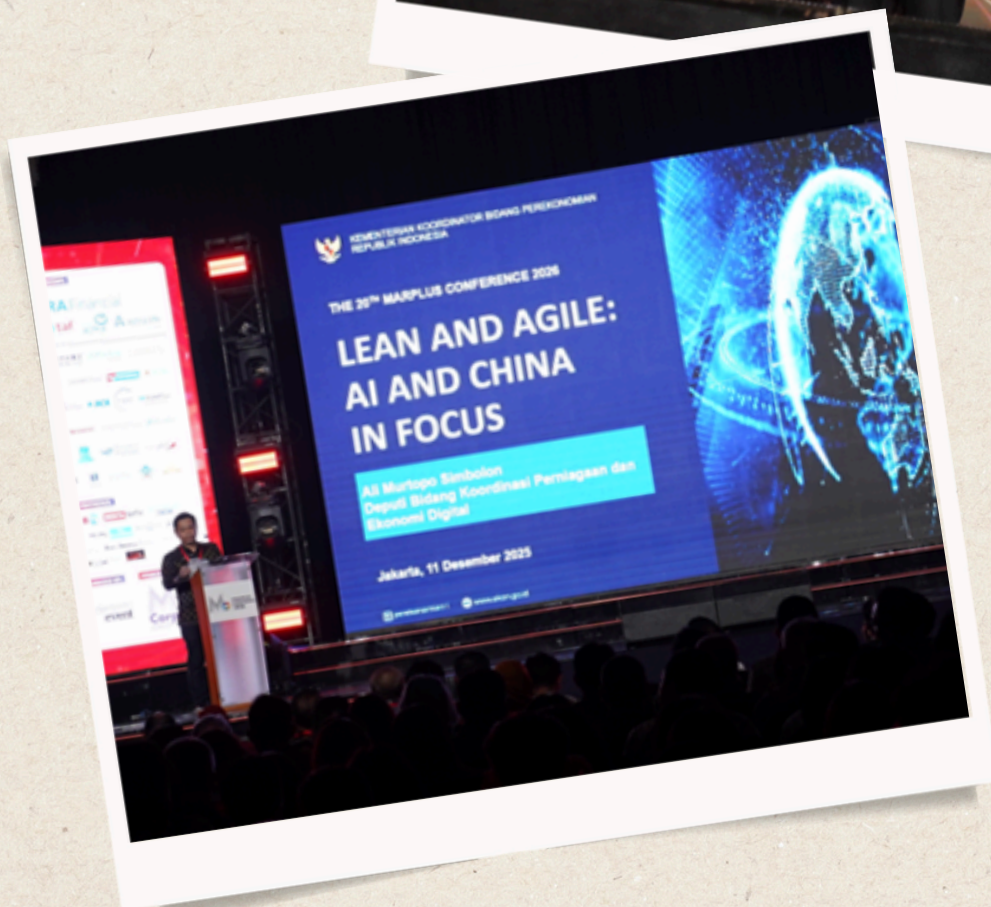


**Menko Airlangga: Jaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Nasional,
Pemerintah Siapkan Program Belanja dan Diskon Transportasi**



PERISTIWA PENTING 2025

11 Dec 2025



Indonesia Tegaskan Ketahanan Ekonomi dan Penguatan Kerja
Sama Strategis pada MarkPlus Conference 2026



PERISTIWA PENTING 2025

Inisiasi Program Pelatihan Gig Economy dan AI Open Innovation Challenge,
Pemerintah Akselerasi Pengembangan Potensi Ekonomi Digital

18 Dec 2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1. Lata Belakang 2

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 4

1.3. Mandat dan Peran Strategis 6

1.4. Sistematika Pelaporan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1. Rencana Strategis 2025 - 2029 9

2.2. Prioritas Nasional 2025 dan Renja 2025 12

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

3.1. Pengukuran Kinerja 22

3.1.1. Pengelolaan Kinerja 22

3.1.2. Pengukuran Kinerja 22

3.2. Analisis Capaian Kinerja 2025 26

3.2.1. Nilai Kinerja Organisasi 26

3.2.2. Capaian Kinerja 29

3.3. Akuntabilitas Keuangan 82

3.3.1. Pagu Anggaran Tahun 2025 82

3.3.2. Keselarasan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja 82

3.3.3. Capaian Kinerja Anggaran 83

3.3.4. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran 84

3.3.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya 87

BAB IV EVALUASI KINERJA 91

4.1. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja 91

4.1.1. Rencana Strategis 91

4.1.2. Perjanjian Kinerja 93

4.1.3. Evaluasi Unit Kerja 96

4.1.4. Evaluasi SAKIP KEMENPAN-RB/INSPEKTORAT 102

4.2. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja 111

BAB V PENUTUP 112

5.1. Kesimpulan 112

5.2. Harapan 112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Koordinasi PERNIAGAAN dan EKONOMI Digital...	5
Gambar 3.1 Status Capaian NKO	22
Gambar 3.2 Proses Perhitungan NKO	23
Gambar 3.3 Polarisasi Maximize.....	24
Gambar 3.4 Polarisasi Minimize.....	24
Gambar 3.5 Ekonomi Digital Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan PDB.....	32
Gambar 3.6 Perkembangan Nilai Ekspor (Miliar USD)	39
Gambar 3.7 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Berbagai Negara	40
Gambar 3.8 Perubahan Ekspor ke AS dan Negara lain, Mei-Juli 2025 (yoy).....	41
Gambar 3.9 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (YoY)	46
Gambar 3.10 Pertumbuhan Penjualan Ritel & Penjualan Kendaraan Bermotor (YoY)..	46
Gambar 3.11 Realisasi Program Belanja Nasional Tahun 2025.....	47
Gambar 3.12 Kelompok-Indikator Sub Indikator.....	54
Gambar 3.13 Efisiensi Melalui Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi ...	87
Gambar 3.16 Efisiensi Melalui Kerja Sama Dengan Lembaga Internasional	88
Gambar 4.1 Dialog Kinerja Penyusunan PK dan LAKIP	106
Gambar 4.2 Dialog Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Deputy III	107
Gambar 4.3 Dialog Kinerja Terkait Isu Strategis Kedeputian	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan & Ekonomi Digital	6
Tabel 1.2	Isu Strategis Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	7
Tabel 2.1	Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2025-2029	11
Tabel 2.2	Anggaran Program Prioritas Nasional	13
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2025	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 2.5	Rencana Aksi Tahun 2025	17
Tabel 3.1	Indeks Capaian IKU	23
Tabel 3.2	Kriteria Nilai Sasaran Strategis	25
Tabel 3.3	Metode Pengukuran IKU	25
Tabel 3.4	Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	27
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Program 1 Tahun 2025	29
Tabel 3.6	Capaian Sementara Kontribusi Ekonomi Digital Terhadap PDB TW IV 2025	30
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kontribusi Ekonomi Digital PDB 2021-2025	32
Tabel 3.8	Perbandingan Kontribusi Ekspor Barang & Jasa terhadap PDB 2021-2025	39
Tabel 3.9	Perbandingan Kontribusi Perdagangan Besar & Eceran Tahun 2021-2025	45
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Program 2 Tahun 2025	50
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian IKU 2.2 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	51
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian IKU 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	55
Tabel 3.13	Capaian Sasaran Program 3 Tahun 2025	57
Tabel 3.14	Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional	58
Tabel 3.15	Capaian Sasaran Program 4 Tahun 2025	63
Tabel 3.16	Indeks SKP dan Rentang Nilai	65
Tabel 3.17	Persentase Efektivitas SKP Unit Kerja Asdep Tahun 2025	65
Tabel 3.18	Capaian Sasaran Program 4 Tahun 2025	66
Tabel 3.19	Capaian Sasaran Program 5 Tahun 2025	72
Tabel 3.20	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Asdep Tahun 2025	73
Tabel 3.21	Capaian Sasaran Program 6 Tahun 2025	76
Tabel 3.22	Realisasi Pelaksanaan RB Tahun 2025	77
Tabel 3.23	Rencana Aksi RB Tahun 2025	77
Tabel 3.24	Pelaksanaan Rencana Aksi RB Triwulan I-IV Tahun 2025	78
Tabel 3.25	Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP	80
Tabel 3.26	Hasil Evaluasi AKIP D. Bidang Koordinasi Perniagaan & Ekonomi Digital	81
Tabel 3.27	Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kerja	82
Tabel 3.28	Pagu dan Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan	83
Tabel 3.29	Capaian Output Program	84

Tabel 3.30 Analisis Efisiensi Keuangan 85

Tabel 3.31 Kualitas Pelaksanaan Anggaran 86

Tabel 3.32 Estimasi Efisiensi Sumber Daya 88

Tabel 4.1 Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2025..... 92

Tabel 4.2 Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 & Target Kinerja Tahun 2026..... 93

Tabel 4.3 Perjanjian Kinerja 2026..... 94

Tabel 4.4 Matriks Evaluasi Unit Kerja 96

Tabel 4.5 Komponen dan Bobot Penilaian Inspektorat 102

Tabel 4.6 Perencanaan Kinerja 103

Tabel 4.7 Pengukuran Kinerja 103

Tabel 4.8 Pelaporan Kinerja 104

Tabel 4.9 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 104



BAB I

PENDAHULUAN



2025

Deputi III

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital



1.1. LATAR BELAKANG

Pelantikan Presiden Republik Indonesia pada akhir tahun 2024 merupakan momentum konstitusional yang menandai dimulainya babak baru kepemimpinan nasional. Peristiwa ini menjadi penegasan kembali arah pembangunan dalam berbagai sektor strategis sesuai agenda pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Selain itu, penguatan tata kelola dan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antarinstansi pemerintah dilakukan dengan pembentukan beberapa organisasi pemerintahan yang baru maupun perubahan nomenklatur organisasi eksisting sesuai dengan Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Struktur organisasi internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diperkuat dengan Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diturunkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2025, pembangunan nasional terus diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah dalam menjawab tantangan sebagai akibat dari dinamika ekonomi global dan domestik. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil sejak periode sebelumnya menjadi landasan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional serta mendorong transformasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pasar global.

Visi Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang disebut “Asta Cita”. Dalam rangka pencapaian Asta Cita, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan misi Kementerian sebagai berikut: (i) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; dan (ii) Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel.

Mendukung misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri, serta Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Meningkatkan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Logistik Nasional;
4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital;
5. Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan.

Sesuai dengan amanat Rencana Kerja Pemerintah dan arah kebijakan pembangunan nasional, fokus pembangunan tahun 2025 menempatkan pentingnya peran sektor perdagangan dan ekonomi digital sebagai penggerak utama peningkatan kapabilitas dan daya saing perekonomian. Sasaran strategis pada tingkat nasional mencakup indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita,

pengembangan sektor strategis, serta pemerataan pembangunan yang produktif dan berkualitas.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan sasaran pembangunan nasional yang selaras dengan prioritas strategis pemerintah. Lebih lanjut, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebagai unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut menetapkan sasaran program tahunan yang terukur dan relevan dengan peran dan fungsi kelembagaan. Sasaran program tersebut mencakup penguatan nilai transaksi dan daya saing perdagangan, peningkatan kualitas ekosistem logistik nasional, pengembangan inklusi dan literasi keuangan, penyusunan kebijakan perniagaan dan ekonomi digital yang berkualitas, serta peningkatan layanan koordinasi kebijakan di bidang perniagaan dan ekonomi digital.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan realisasi capaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital menjalankan peran dalam sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, logistik, ekonomi digital, serta peningkatan inklusi keuangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sesuai dengan tema RKP, sasaran pembangunan tahun 2025 yang ditetapkan diantaranya adalah Pertumbuhan Ekonomi, GNI Per Kapita, Kontribusi PDB Maritim, Kontribusi PDB Manufaktur, Rasio Gini. Sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan sasaran strategis tahun 2025 dalam bentuk: (1) Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; (2) Terkendalinya Tingkat Inflasi Nasional sesuai dengan Fundamental Ekonomi; (3) Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Berkelanjutan; (4) Terwujudnya Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas; (5) Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian yang Berkualitas; (6) Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berkualitas.

Sesuai dengan sasaran program pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebagai unit kerja dibawahnya menetapkan sasaran program tahun 2025 berupa: (1) Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan, (2) Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas, (3) Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan; (4) Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas; (5) Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas; (6) Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas. Sasaran program tersebut kemudian dirinci lebih lanjut dalam berbagai indikator kinerja dengan target tertentu.

Dengan telah selesainya tahun 2025, maka Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital menyusun laporan sesuai dengan capaian realisasi kinerja atas target yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja tersebut disusun sebagai perwujudan tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, amanat yang diemban Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital meliputi sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga, Fasilitas Perdagangan, Pengembangan Ekspor, Pengembangan Logistik Nasional, Pengembangan Ekonomi Digital, Peningkatan Inklusi Keuangan. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, laporan kinerja juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi pada periode mendatang.

1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

a. Kedudukan

Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital dipimpin oleh Deputy yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

b. Tugas

Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dan ekonomi digital.

c. Fungsi

Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital menyelenggarakan 6 (enam) fungsi yang terdiri dari:

- 1) sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dan ekonomi digital;
- 2) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dan ekonomi digital;
- 3) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan dan ekonomi digital;
- 4) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan dan ekonomi digital;

- 5) pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

d. Struktur Organisasi

Seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital membawahi 5 (lima) unit eselon 2 yaitu:

- 1) Sekretariat Deputy
- 2) Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- 3) Asisten Deputy Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
- 4) Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional;
- 5) Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital;
- 6) Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan.

Struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mengalami penyesuaian sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital



Adapun jumlah sumber daya manusia Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital per Desember 2025 adalah sebanyak 105 orang. Rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

No		Unit Kerja		PEGAWAI NEGERI SIPIL					PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)			
				Eselon				Pelaksana		S-1	D-3	SLT A	Penge mudi
				I	II	III	IV						
1	Deputi	1											

2	Sekretaris Deputy		1	3	4	5	10	1	-	1	2
3	Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga		1	2	1	8	-	-	-	-	1
4	Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor		1	3	2	7	-	-	-	-	1
5	Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional		-	3	3	9	2	-	-	-	-
6	Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital		1	3	2	6	1	4	-	0	1
7	Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan		1	3	2	7	1	-	-	-	1
JUMLAH		1	5	17	14	42	14	4	-	2	6

Dalam rangka mendukung program kerja dan rencana kerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi, sesuai DIPA Tahun Anggaran 2025 Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mendapatkan pagu anggaran dengan total sebesar Rp21.800.000.000 (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*), kemudian sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dari total pagu awal diblokir sejumlah Rp14.198.493.000 (*Empat Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Dengan demikian, total anggaran setelah mengalami blokir menjadi sebesar Rp7.601.507.000 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sasaran pembangunan yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat agenda pembangunan tersebut diantaranya adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pemerintah telah menyusun indikator dan target baik dalam jangka waktu lima tahun maupun dalam jangka waktu tahunan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP).

Dengan mengemban tugas dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan di bidang perniagaan dan ekonomi digital. Peran strategis tersebut terwujud dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang: (1) perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga; (2) fasilitasi perdagangan dan pengembangan ekspor; (3) pengembangan logistik nasional; (4) pengembangan ekonomi digital; (5) peningkatan inklusi keuangan. Sejalan dengan peran strategis tersebut, isu strategis

yang diampu oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Isu Strategis	Unit Eselon II
1	a. Koordinasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Rakyat b. Koordinasi Kebijakan Perlindungan Konsumen di Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) c. Koordinasi Program Belanja Nasional	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
2	a. Koordinasi Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam b. Koordinasi Kebijakan Tata Niaga Ekspor dan Impor (Revisi Permendag)	Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor
3	a. Koordinasi penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik b. Koordinasi penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik c. Koordinasi Peningkatan daya saing SDM dan penyedia jasa logistik	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
4	a. Pelaksanaan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) b. Koordinasi kebijakan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam penyusunan Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial dan Etika Kecerdasan Artifisial, serta Roadmap Infrastruktur Digital c. Koordinasi kebijakan di bidang ekonomi digital pada tingkat internasional	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital

5	a. Peningkatan akses layanan keuangan formal b. Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen c. Perluasan jangkauan layanan keuangan digital d. Penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Kecil e. Peningkatan produk dan layanan keuangan digital f. Penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif, paling sedikit melalui layanan keuangan digital	Asisten Peningkatan Keuangan	Deputi Inklusi
---	---	------------------------------	----------------

1.4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyajian laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang perencanaan strategis, program prioritas nasional dan rencana kerja, serta penetapan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan tahun 2025.

Bab IV Evaluasi Kinerja

Bab ini menjelaskan evaluasi atas perencanaan kinerja, tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat, dan rencana aksi akuntabilitas kinerja.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan simpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan rencana aksi tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2025

Deputi III

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital



2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2025-2029 adalah sebagai berikut.

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2025 - 2029. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 diwujudkan melalui 2 (dua) Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meliputi:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian/Lembaga yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah dirumuskan.

Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital disusun berdasarkan dokumen Renstra Kemenko Bidang Perekonomian 2025-2029 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Kemenko Bidang Perekonomian. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”

Mengacu pada visi tersebut, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Perdagangan dan Ekonomi Digital dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Inklusif, dan Berkelanjutan melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045”

Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital yang merupakan salah satu unit Eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yaitu Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Responsibility (PIKIR). Nilai-nilai dasar organisasi ini akan memberikan keyakinan kepada semua pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan khususnya bidang perdagangan dan ekonomi digital. Dalam rangka pencapaian visi dan mendukung misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah ditetapkan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital menetapkan 5 misi meliputi:

1. Meningkatkan Perdagangan Dalam Negeri, serta Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Meningkatkan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;
3. Mewujudkan Penguatan Logistik Nasional;
4. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Digital;
5. Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, dirumuskan tujuan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital adalah: “Terwujudnya Pengelolaan Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Tinggi dan Berkelanjutan”. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pelaksanaan kebijakan sektor/lintas sektor di bidang perdagangan dan ekonomi digital mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang perdagangan dan ekonomi digital yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya tujuan Deputy Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital akan tercapai.

Sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan ekonomi digital; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan ekonomi digital; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan dan ekonomi digital.

Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital dijabarkan kedalam sasaran program sebagai berikut:

1. Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
2. Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas.
3. Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan.
4. Terwujudnya Kebijakan Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas.
5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas.
6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas.

Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital merumuskan 6 (enam) sasaran program dan 9 (sembilan) indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy, serta dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sasaran program disusun sebagai cerminan tingkat keberhasilan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital yang diukur melalui beberapa indikator kinerja program. Selama 5 tahun, Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital memiliki target pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program	Target				
		2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
SP.1	Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional					
Indikator Kinerja:						
1.1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%	9-10%	10-11%	11-12%	12-13%
1.2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21.7%	21.9%	22.0%	22.2%	22.6%
1.3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13.07*% (11.68**)	11.99%	12.3%	12.63%	12.84%
SP.2	Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas					
Indikator Kinerja:						
2.1	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8.27%	8.09%	7.91%	7.74%	7.56%
2.2	Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1.7 hari	1.6 hari	1.5 hari	1.4 hari	1.2 hari
SP.3	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan					
Indikator Kinerja:						
3.1	Indeks Literasi Keuangan	57.25	60.27	63.30	66.32	69.35
SP.4	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					

No	Sasaran Program	Target				
		2025*	2026*	2027*	2028*	2029*
Indikator Kinerja:						
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
SP.5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
Indikator Kinerja:						
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
SP.6	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas					
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	85%	85%	85%	85%

*) terjadi penyesuaian target

2.2. PRIORITAS NASIONAL 2025 DAN RENJA 2025

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, 7 (tujuh) program prioritas nasional yang merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025.

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025 terdiri dari: (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program prioritas nasional yang berkaitan dengan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terwujud dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas nasional tersebut memiliki 4 (empat) sasaran yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru; Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi; serta Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan, pada tahun 2025 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki program pendukung prioritas nasional yang terdiri dari memantapkan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital kemudian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.485.000.000 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) untuk program prioritas nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran Program Prioritas Nasional

No	Program Prioritas	Anggaran
1	Ekonomi Digital	Rp5.000.000.000
2	Optimalisasi Backbone Integritas Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	Rp2.000.000.000
3	Pendalaman Sektor Keuangan	Rp4.485.000.000
4	Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	Rp1.000.000.000
Total		Rp12.485.000.000

Kemudian sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025, anggaran diblokir sejumlah Rp7.693.163.000 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Dengan demikian, total anggaran program prioritas setelah mengalami blokir menjadi sebesar Rp4.791.837.000 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Program reguler dan program prioritas nasional Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital menetapkan 6 (enam) Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Renja 2025. Secara rinci IKK Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025
1.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Koordinasi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang Berkualitas.	
	Indeks Keberdayaan Konsumen	63
	Persentase Penyelesaian Isu terkait Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang Diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I	90%
	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	90%
2.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Koordinasi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Berkualitas	
	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa	21-21,6
	Persentase Penyelesaian Isu terkait Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor yang Diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I	90%
	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	90%
3.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	
	Persentase Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,27%
	Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 hari
	Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Logistik Nasional yang Diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I	90%
	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Logistik Nasional	90%
4.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Pengembangan Ekonomi Digital yang Berkualitas	
	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2025
	Persentase Penyelesaian Isu terkait Pengembangan Ekonomi Digital yang Diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I	90%
	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Digital	90%
5.	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Peningkatan Inklusi Keuangan yang Berkualitas	
	Indeks Literasi Keuangan	57,25
	Persentase Penyelesaian Isu terkait Inklusi Keuangan yang Diputuskan melalui Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I	90
	Persentase Capaian Prioritas Nasional yang terkait dengan Inklusi Keuangan	90
6.	Terwujudnya Dukungan Manajemen pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Optimal	
	Indeks Kepuasan Layanan Manajemen pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4
	Nilai Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	90

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu disusun dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%
		1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21.7%
		1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13.07%
2.	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8.27%
		2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1.7 hari
3.	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	3.1 Indeks Literasi Keuangan	57.25
4.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4
5.	Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%

Tabel 2.5
Rencana Aksi Tahun 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%	Optimalisasi pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital	Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan terkait e-commerce	Penyelesaian isu/permasalahan terkait e-commerce	Monitoring dan Evaluasi isu/permasalahan terkait e-commerce	a. Tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi High Level Meeting isu/permasalahan terkait e-commerce b. Monitoring dan Evaluasi jumlah volume transaksi e-commerce sebagai proyeksi pengukuran ekonomi digital terhadap PDB c. Perencanaan kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2026
		Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan ekspor barang dan jasa	a. Koordinasi High Level Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 b. Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA	Koordinasi Evaluasi Implementasi Pelaksana dan Kelompok Kerja Satgas Peningkatan Ekspor Nasional	a. Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Implementasi Permendag No 8 Tahun 2024 b. Tindak Lanjut Koordinasi High Level Meeting

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
								Evaluasi Implementasi Permendag No 23 Tahun 2023 c. Perencanaan kegiatan Pengembangan Ekspor tahun 2026
		Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan perdagangan besar dan eceran	a. Pengumpulan data dan informasi terkait isu/permasalahan Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat (BINA dan Launching Friday Mubarak) c. Pengumpulan data dan informasi terkait Pengembangan Konektivitas	a. Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat c. Penyelesaian isu/permasalahan terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik.	a. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Tindak Lanjut Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat c. Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat,	a. Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Penyelesaian Kendala Pencapaian Target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB b. Monitoring Kegiatan Pelaksanaan Program Belanja Masyarakat c. Perencanaan kegiatan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik		Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik.	
2.	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8.27%	Optimalisasi pelaksanaan strategi pencapaian sasaran biaya transportasi logistik	Pengumpulan data dan informasi terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Penyelesaian isu/permasalahan terkait Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik	a. Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Pengembangan Konektivitas Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel untuk Efisiensi Biaya Logistik b. Perencanaan kegiatan pengembangan logistik tahun 2026
		Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 hari	Optimalisasi pelaksanaan strategi pencapaian sasaran rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Pengumpulan data dan informasi terkait Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas	Monitoring Evaluasi Standarisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas
3.	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	Indeks Literasi Keuangan	57.25	Optimalisasi pelaksanaan strategi peningkatan literasi keuangan	Pengumpulan data dan informasi terkait peningkatan indeks literasi keuangan	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting peningkatan indeks literasi keuangan	Tindak Lanjut Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting peningkatan indeks literasi keuangan	Perencanaan kegiatan peningkatan indeks literasi keuangan tahun 2026

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
4	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang efektif	a. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Pengendalian Impor b. Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	a. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor b. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan c. Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi	a. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkatan Laut, Darat, Udara dan Rel b. Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Perdagangan Ritel	a. Monitoring Evaluasi kebijakan terkait pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan b. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi High Level Meeting kebijakan terkait dengan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan
5.	Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan	3 dari 4	Terpenuhinya seluruh layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kepada stakeholder	Memberikan arahan penyusunan kesioner pengukuran Survei Sinkronisasi,	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi,	a. Memberikan arahan tindak lanjut hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi, dan	Memberikan arahan pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital		demi terciptanya kebijakan yang berkualitas	Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I b. Memberikan arahan Persiapan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II	Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	a. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI) b. Nilai SAKIP c. Tingkat Digitalisasi Arsip	a. Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan c. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan b. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan b. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	a. Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja (TW IV) b. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan c. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 d. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Deputi III
Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

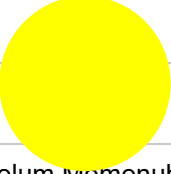
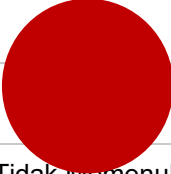
3.1.1. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital meliputi Penetapan Kinerja yang dilakukan melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerai Otomatisasi), di laman situs <http://kinerja.ekon.go.id>.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

3.1.2. Pengukuran Kinerja

Gambaran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan membandingkan realisasi dan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja, dilakukan pengukuran Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian sasaran unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran dari unit kerja. Status capaian NKO ditunjukkan dengan warna hijau/kuning/merah sesuai dengan nilainya dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.1 Status Capaian NKO		
		
Memenuhi Ekspektasi	Belum Memenuhi Ekspektasi	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam sebuah organisasi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi sehingga menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Capaian IKU dan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini:

Gambar 3.2
Proses Perhitungan NKO



Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (N/A), bukan diberikan nilai 0 (nol) serta harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Proses selanjutnya adalah melakukan indeksasi capaian IKU dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU, maka dapat diperoleh Nilai Perspektif (NP). NP adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NP adalah dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (N/A), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Formula Penghitungan Indeks Capaian IKU

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indeks Capaian IKU

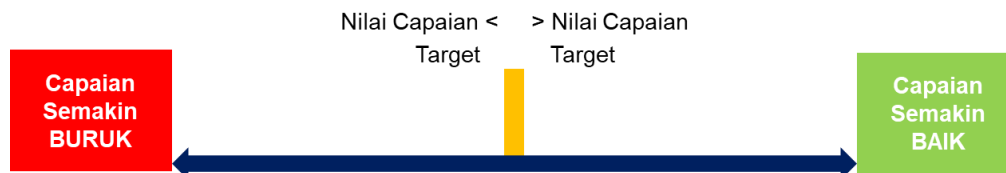
	Hijau	$IKU \geq 100\%$	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>
	Kuning	$80\% \leq IKU < 100\%$	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>
	Merah	$IKU < 80\%$	<i>Tidak Memenuhi Ekspektasi</i>

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3 yaitu maximize, minimize, dan stabilize sebagai berikut:

1) Polarisasi *Maximize*

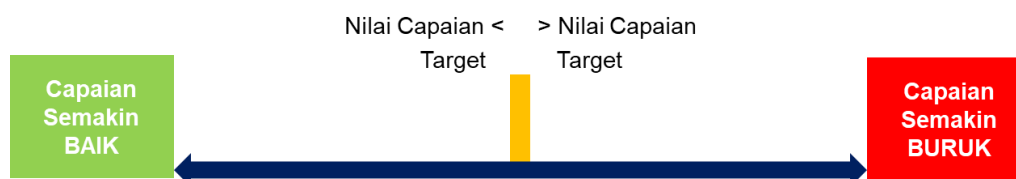
Pada polarisasi *maximize* kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh IKU dengan polarisasi *maximize* adalah persentase pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3.3
Polarisasi Maximize

2) Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh IKU dengan polarisasi *minimize* adalah persentase jumlah temuan pemeriksaan.

Gambar 3.4
Polarisasi Minimize

3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh IKU dengan polarisasi *stabilize* adalah target inflasi.

Formula Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh NSS. Status SS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Nilai Sasaran Strategis

	Hijau	$NSS \geq 100\%$	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>
	Kuning	$80\% \leq NSS < 100\%$	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>
	Merah	$NSS < 80\%$	<i>Tidak Memenuhi Ekspektasi</i>

Tabel 3.3
Metode Pengukuran IKU

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target	Polarisasi
1	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	1.1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%	Maximize
		1.2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%	Maximize
		1.3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%	Maximize
2	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,27%	Minimize
		2.2	Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 Hari	Minimize
3	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	3.1	Indeks Literasi Keuangan	57,25	Maximize
4	Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Maximize

5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	Maximize
6	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	Maximize

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2025

3.2.1. Nilai Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki 6 (enam) Sasaran Program dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
					IKU	NSS
1	<i>Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan</i>	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%	N/A	N/A	103,03%
		Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%	22,85%	105,29%	
		Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%	13,17%	100,77%	
2	<i>Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas</i>	Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,27%	10,30%	80,29%	100,15%
		Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 Hari	1,22 Hari	120%	
3	<i>Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan</i>	Indeks Literasi Keuangan	57,25	66,64	116,4%	116,4%
4	<i>Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</i>	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	3 (Baik)	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	
					IKU	NSS
5	<i>Terwujudnya penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital</i>	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4 (Baik)	3,43 (Baik)	114,33%	114,33%
6	<i>Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas</i>	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	85%	100%	117,65%	117,65%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025					108,59	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024					101,92	

Berdasarkan perhitungan di atas, NKO Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 108,67 (memenuhi ekspektasi). Capaian kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kinerja seperti tahun 2024 berada pada status memenuhi ekspektasi dengan NKO sebesar 101,92.

3.2.2. Capaian Kinerja



Sasaran Program 1

Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdiri dari:

- ❖ Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB
- ❖ Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB
- ❖ Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB

Pada tahun 2025, realisasi capaian 3 (tiga) indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 105,04 (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Program 1 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	%	8-9	N/A	N/A
IKU 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	%	21,7	22,85	105,29
IKU 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	%	13,07	13,17	100,77
Nilai Sasaran Strategis			103,03%	

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dalam mencapai sasaran program terwujudnya penguatan nilai transaksi dan daya saing perdagangan dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja.

IKU 1.1

Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB



Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemajuan transformasi ekonomi berbasis teknologi di Indonesia. Ekonomi digital meliputi berbagai aktivitas yang didorong oleh teknologi digital, seperti *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), aplikasi digital, serta digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti manufaktur. Peningkatan kontribusi ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mendukung, percepatan literasi digital masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pelaku usaha digital. Untuk memastikan capaian yang optimal, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara lintas kementerian/lembaga. Target ini selaras dengan RPJMN dan Visi Indonesia Digital 2045, serta menjadi ukuran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan potensi ekonomi digital.

Pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Formula perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut: Formula perhitungan sementara yang tercantum pada Manual IKU, ialah:

Kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

$$= \frac{(\text{Nilai Tambah Ekonomi Digital} : \text{Nilai Produk Domestik Bruto}) \times 100\%}{}$$

Dalam rangka mendorong hal tersebut, kebijakan pengembangan dan penguatan ekosistem ekonomi digital disusun melalui berbagai strategi komprehensif. Pembangunan Infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi, menjadi fondasi bagi pengembangan *e-commerce* terus ditingkatkan. Aksesibilitas yang luas dan internet yang stabil memungkinkan lebih banyak pelaku usaha dan konsumen untuk berpartisipasi dalam ekosistem digital. Pemerintah juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang digital. Pelatihan dan program pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha, pengembang/developer, dan tenaga kerja lainnya menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan *e-commerce*. Kerangka regulasi yang mendukung dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital juga menjadi kunci keberhasilan *e-commerce*.

Pemerintah dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif terkait kontribusi ekonomi digital terhadap PDB. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB Tahun 2025 adalah sebesar 8-9%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada dokumen RPJMN 2025-2029. Capaian IKU 1.1 sampai dengan triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Capaian Sementara Kontribusi Ekonomi Digital Terhadap PDB Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Kinerja
IKU 1.1. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	Persentase	8-9%	N/A	N/A

Keterangan: *) angka realisasi merupakan proyeksi

Berdasarkan data Bank Indonesia dalam buku laporan PTBI Tahun 2025, diperoleh nilai realisasi “*Digital Payment*” sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp78.563,1 Triliun atau dengan pertumbuhan sebesar 10,8%. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk membantu ekonomi digital ditempuh melalui program-program infrastruktur pembayaran (*retail, wholesale, data*), penguatan industri, pengembangan inovasi, kerja sama internasional, dan pengembangan Rupiah Digital.

Digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional perlu terus diakselerasi untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berdaya tahan. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan transaksi ekonomi-keuangan digital secara ritel penting untuk kemudahan bertransaksi sehari-hari secara cepat, mudah, dan biaya yang lebih murah, sehingga memperluas ekonomi dan keuangan inklusif untuk rakyat. Demikian pula digitalisasi sistem pembayaran nilai besar (*wholesale*) perlu terus dikembangkan, termasuk eksperimentasi penerbitan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) dan Aset Keuangan Digital (tokenisasi aset). Kerja sama antarnegara dalam sistem pembayaran digital, termasuk konektivitas infrastruktur pembayaran (ritel dan *wholesale*), perlu terus dijalin dan diperluas.

Selain itu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Agustus 2025(*), Indonesia menjadi negara dengan penjualan *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara dengan nilai total penjualan neto sebesar US\$64 miliar. Lebih lanjut lagi, Bank Indonesia memprediksi nilai transaksi *e-commerce* tumbuh 3,3%, dari semula Rp487 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp503 triliun pada tahun 2025. Ini menunjukkan posisi Indonesia kuat dalam pasar *e-commerce* regional, baik dari sisi skala maupun adopsi digital oleh konsumen dan pelaku usaha.

Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB tahun 2025 (target 8-9%) di-*cascading non-direct* dari unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital dengan target jumlah volume transaksi *e-commerce* tahunan sebesar 2,4 dan target triwulanan sebesar 0,6 miliar faktur transaksi dan didukung oleh indikator “persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks: Infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi dan Investasi”. Sampai dengan Triwulan IV 2025 ini, nilai realisasi sementara sebesar 2,73 miliar faktur transaksi atau mencapai 120% dari target tahunan sebesar 2,4 miliar faktur transaksi (Data Bank Indonesia pada Triwulan III Tahun 2025). Data ini masih sementara, mengingat Bank Indonesia merencanakan penerbitan data Triwulan IV Tahun 2025 pada akhir bulan Januari 2026 mendatang.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas digital dan transformasi berbasis teknologi sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengukur secara tepat kontribusi ekonomi digital terhadap PDB Indonesia. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital secara aktif melakukan koordinasi rutin mengenai konseptual pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB sepanjang tahun 2025 dengan melibatkan Bappenas, BPS, Komdigi, dan didukung oleh Prospera. Proses pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB saat ini masih dalam tahap proses penyelarasan definisi dan cakupan, dan masih dalam tahap formulasi untuk mengukur indikator ini.

Meskipun kontribusi spesifik ekonomi digital terhadap PDB belum dirinci secara resmi, beberapa indikator menunjukkan peran penting sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional pada Triwulan III 2025 memperlihatkan pertumbuhan tahunan sebesar 5,04% (*year-on-year*), mencerminkan stabilitas dan daya tahan ekonomi domestik.

Di samping kontribusi sektor tradisional seperti konsumsi rumah tangga dan investasi, ekonomi digital memainkan peran penopang penting.

Gambar 3.5
Ekonomi Digital Indonesia dalam Mendorong Pertumbuhan PDB



Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kontribusi Ekonomi Digital PDB 2021-2025

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Transaksi e-commerce (triliun rupiah) (*)	401	476,3	474**	537**	
Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB (%)					8%

(*) Indikator kinerja bersumber dari nomenklatur UKE-2 tahun 2021-2024 dan terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2025.

(**) Nilai yang tercantum pada LAKIP periode bersangkutan

Perubahan indikator kinerja dari nilai transaksi *e-commerce* (2021-2024) menjadi kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (2025) menandai transisi strategis dari pengukuran sektoral yang sempit menuju dampak ekonomi makro yang lebih komprehensif. Pada periode sebelumnya, pemerintah berfokus pada pertumbuhan volume aktivitas perdagangan digital yang bersifat *output*, namun dalam menyongsong RPJMN 2025-2029, fokus dialihkan pada sejauh mana seluruh ekosistem digital mampu menggerakkan nilai tambah nasional.

Penyelarasan ini bertujuan untuk mengintegrasikan transformasi digital ke dalam struktur ekonomi nasional secara utuh, dengan menetapkan target kontribusi sebesar 8-9% terhadap PDB pada tahun 2025 sebagai landasan baru. Langkah ini mencerminkan ambisi pemerintah dalam RPJMN periode mendatang untuk tidak sekadar mendorong konsumsi digital, melainkan memperkuat daya saing dan produktivitas lintas sektor dan melalui digitalisasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan ini, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah menetapkan serangkaian inisiatif strategis konkret yang difokuskan pada pengembangan ekonomi digital sebagai salah satu pilar utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja adalah meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 8-9 % melalui pelaksanaan strategi pengembangan ekonomi digital yang terintegrasi dan terkoordinasi lintas sektor.

Untuk mencapai target tersebut, Deputy mengarahkan kebijakan pada optimalisasi strategi ekonomi digital, yang meliputi langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan data dan informasi terkait isu serta permasalahan di sektor *e-commerce*, penyelesaian permasalahan pasar digital melalui koordinasi lintas instansi, hingga monitoring dan evaluasi volume transaksi *e-commerce* sebagai indikator pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB. Selain itu, perencanaan program dalam menyusun kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital Tahun 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian aksi strategis untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi implementasi kebijakan ini.

Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi digital juga melibatkan penguatan sistem transaksi digital dan integrasi infrastruktur digital nasional. Pada forum-forum strategis seperti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2025, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas digitalisasi transaksi, memperkuat sistem pembayaran digital seperti *QRIS*, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif dan berkelanjutan bersama dengan Bank Indonesia, OJK, serta industri fintech. Digitalisasi ini telah terbukti meningkatkan efisiensi, memperluas kanal pembayaran, dan memperluas inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Seiring dengan komitmennya dalam memperkuat ekonomi digital nasional dan regional, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital juga turut mengambil peran strategis dalam negosiasi dan pencapaian *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA), sebuah perjanjian kerangka ekonomi digital yang dirancang untuk mempercepat integrasi dan pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN. ASEAN-DEFA merupakan bagian dari *Priority Economic Deliverables* ASEAN 2025 dan menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi digital regional.

Sepanjang tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital aktif terlibat dalam proses negosiasi dan *advokasi* *ASEAN Digital Economy Framework Agreement* (DEFA) sebagai bagian dari peran Indonesia dalam memperkuat integrasi ekonomi digital regional ASEAN. Agenda ASEAN DEFA merupakan salah satu *Priority Economic Deliverables* ASEAN yang dirancang untuk menjadi perjanjian ekonomi digital komprehensif pertama di kawasan yang mengatur berbagai aspek penting digitalisasi seperti arus data lintas batas, pembayaran elektronik, identitas digital, perlindungan data, keamanan siber, mobilitas talenta digital, serta kerja sama teknologi baru. Perundingan ini telah memasuki tahap intensif dengan 15 putaran pembahasan hingga November 2025, menandai kemajuan signifikan dalam penyusunan kerangka kerja sama tersebut.

Salah satu capaian penting adalah kontribusi aktif Indonesia melalui delegasinya dalam mencapai *kesepakatan substansial* pada perundingan ASEAN DEFA putaran ke-14, yang digelar pada 7–10 Oktober 2025 di Jakarta dan dilanjutkan dengan putaran ke-15 pada 25-27 November 2025 di ASEAN Secretariat. Pada pertemuan tersebut, negara-negara anggota ASEAN berhasil menyetujui sejumlah ketentuan kunci yang mencerminkan prinsip bersama dalam mengharmonisasikan regulasi digital di kawasan.

Lebih jauh lagi, Deputy juga memperkuat kolaborasi lintas lembaga seperti Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK untuk memperluas literasi dan inklusi digital sehingga masyarakat

dan pelaku usaha dapat mengakses, memahami, dan mengoptimalkan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi mereka. Sinergi tersebut bertujuan tidak hanya pada peningkatan penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas SDM digital dan penetrasi layanan digital di daerah terpencil (daerah 3T).

Selain itu, kebijakan pengembangan ekonomi digital juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur digital strategis dengan penyusunan *roadmap* infrastruktur digital bersama Kementerian/Lembaga terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selaku inisiator. Investasi dalam infrastruktur digital dipandang sebagai fondasi yang diperlukan untuk mendorong inovasi, daya saing, dan pertumbuhan sektor digital dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, pengembangan ekonomi digital dari perspektif pilar inovasi telah dilakukan beberapa koordinasi dengan Kementerian Komdigi, serta K/L terkait lainnya berupa penyusunan Rancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial dan Rancangan Perpres Etika Kecerdasan Artifisial. Keduanya ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pengembangan dan adopsi AI di Indonesia.

Keseluruhan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital untuk menjadikan ekonomi digital sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, tidak hanya melalui peningkatan kontribusi PDB namun juga dengan memperluas akses, mendorong inovasi, dan memperkuat sinergi kebijakan serta kolaborasi antar lembaga terkait.

Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi dan audiensi dengan pelaku usaha, kunjungan kerja ke pelaku usaha, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan, dan mengetahui kebijakan terbaik dalam hal kontribusi ekonomi digital nasional.

Rencana Aksi	Keterangan
Pengumpulan data dan informasi isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	Koordinasi serta pengumpulan data dan informasi terkait identifikasi isu/permasalahan, serta pelaksanaan kegiatan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan digitalisasi sentra UMK/IKM guna meningkatkan jumlah volume transaksi <i>e-commerce</i> dengan berpartisipasi dalam Lokakarya "Produk Lokal Menembus Pasar Inggris Melalui <i>E-Commerce</i> " pada Januari 2025 dan diskusi dengan ISD mengenai <i>e-commerce</i> pada Maret 2025.
Penyelesaian isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	❖ Tanggapan Atas Masukan Idea terhadap RPMK PMSE yang diselenggarakan pada 17 April 2025 berdasarkan Surat Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.02/42/D.III.M.EKON.5/04/2025 tertanggal 14 April 2025. Ditindaklanjuti dengan penyampaian notula rapat No:KWU.06.02/04/D.III.M.EKON.5/04/2025 pada 17 April 2025. ❖ Koordinasi pembahasan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.01/73/D.III.M.EKON.5/06/2025 tertanggal 20 Juni 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula Rapat B/KWU.06.01/42/D.III.M.EKON.5/06/2025 tertanggal 23 Juni 2025

Monitoring dan Evaluasi isu/permasalahan terkait <i>e-commerce</i>	❖ Dalam agenda <i>Kick Off</i> Pembahasan Keikutsertaan Indonesia dalam <i>Event</i> dan <i>Businnes Matching</i> pada <i>4th Global Digital Trade Expo (GDTE) 2025</i> berdasarkan Surat Undangan Asdep Pengembangan Ekonomi Digital Nomor : KWU.06.01/91/D.III.M.EKON.5/07/2025 tanggal : 22 Juli 2025. ❖ Laporan Rapat <i>Kick Off</i> Pembahasan Keikutsertaan Indonesia dalam <i>Event</i> dan <i>Businnes Matching</i> pada <i>4th Global Digital Trade Expo (GDTE) 2025</i> berdasarkan Nota Dinas Asdep Pengembangan Ekonomi Digital Nomor : KWU.06.02/90/D.III.M.EKON.5/07/2025.
Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi High Level Meeting Isu/Permasalahan terkait <i>E-Commerce</i>	Tindak lanjut monitoring dan evaluasi isu permasalahan <i>e-commerce</i> dilaksanakan dalam agenda: ❖ Koordinasi Penyelenggaraan Perundingan ASEAN DEFA ke-14 di Jakarta pada tanggal 7-10 Oktober 2025 di Hotel Le Meridien Jakarta. ❖ Pelaksanaan <i>relay</i> perundingan ASEAN DEFA ke-14 melalui Undangan Nomor KWU.06.01/113/D.III.M.EKON.5/09/2025 pada 18 September 2025. ❖ Penugasan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital sebagai <i>exhibitor</i> pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI x IFSE) pada tanggal 30 Oktober - 1 November 2025. ❖ Koordinasi Diskusi Hasil Indeks Daya Saing Digital Indonesia di Tingkat Global. No: KWU.06.01/136/D.III.M.EKON.5/11/2025 pada 10 November 2025. ❖ Koordinasi terkait Pengembangan <i>Gig Economy</i> sebagai Pendukung Paket Kebijakan Ekonomi Nasional No: KWU.06.01/141/D.III.M.EKON.5/11/2025 pada 17 November 2025. ❖ Koordinasi Diskusi dukungan <i>program Support to Consumer Protection, Competitiveness and SMEs in ASEAN (SUCCESS)</i> No: KWU.06.01/149/D.III.M.EKON.5/12/2025 pada 10 Desember 2025. ❖ Koordinasi Finalisasi Metodologi Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB No: KWU.06.01/152/D.III.M.EKON.5/12/2025 pada 15 Desember 2025. ❖ Koordinasi diskusi Proyek Strategis Nasional Pusat Data Nasional No: KWU.06.01/156/D.III.M.EKON.5/12/2025 pada 15 Desember 2025. ❖ Koordinasi masukkan atas Draft <i>MoU Economic Growth Partnership (EGP)</i> RI-Inggris sebagaimana Nota Dinas Nomor: KSI.02.01/ 134 /D.III.M.EKON.5/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025.
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Volume Transaksi <i>E-Commerce</i> sebagai	Monitoring dan Evaluasi Jumlah Volume Transaksi <i>E-Commerce</i> sebagai Proyeksi Pengukuran Ekonomi Digital terhadap PDB dilaksanakan melalui:

Proyeksi Pengukuran Ekonomi Digital terhadap PDB	❖ Tindak lanjut monitoring dan evaluasi melalui ND nomor: PH.02.02/139/D.III.M.EKON.5/11/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital tentang Tim Koordinasi Perumusan Kerangka Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB. ❖ Rapat Finalisasi Metodologi Pengukuran Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB No: KWU.06.01/152/D.III.M.EKON.5/12/2025 pada 15 Desember 2025.
Perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2026	Telah dilaksanakan perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Digital tahun 2026 pada tanggal 15 Desember 2025 di Ruang Rapat Loka 2, Gedung Ali Wardhana yang dihadiri oleh Tim Kerja Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital bersama Sekretariat Deputi.

a. Hambatan dan Kendala IKU 1.1

Dalam pelaksanaan pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan penanganan secara sistematis, antara lain:

- a. belum adanya definisi operasional dan batasan yang disepakati mengenai pendekatan *narrow* dan *broad* ekonomi digital menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penentuan cakupan dan klasifikasi aktivitas ekonomi digital.
- b. terdapat keterbatasan data, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) belum memiliki survei khusus mengenai ekonomi digital, serta menghadapi tantangan dalam memisahkan aktivitas digital dan nondigital, khususnya pada sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom).
- c. keberlanjutan pelaksanaan survei masih terkendala oleh keterbatasan pendanaan yang dialokasikan kepada BPS.
- d. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit yang berlaku saat ini belum sepenuhnya merepresentasikan aktivitas ekonomi digital secara spesifik dan terperinci.
- e. belum tersedianya sistem berbagi data transaksi lintas batas antara BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan *platform* digital global, seperti Google, Netflix, atau Spotify turut membatasi kelengkapan dan akurasi estimasi kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.

Secara keseluruhan, isu-isu tersebut berimplikasi pada tantangan dalam menghasilkan pengukuran yang komprehensif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Selain permasalahan dalam aspek pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB, pelaksanaan pilar Strategi Nasional (Stranas) Pengembangan Ekonomi Digital —yang mendukung indikator kontribusi ekonomi digital terhadap PDB— juga menghadapi sejumlah tantangan struktural. Pada pilar Infrastruktur, kualitas layanan internet Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, dengan rata-rata kecepatan unduh *mobile broadband* sebesar 49,30 Mbps dan *fixed broadband* sebesar 42,79 Mbps (Speedtest Global Index, 2025). Di samping itu, kapasitas pusat data (*data center*) nasional masih terbatas dan penetrasi internet belum merata secara geografis sehingga menghambat pemerataan transformasi digital.

Pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia masih menghadapi defisit talenta digital yang berdampak pada terbatasnya kapasitas industri dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi digital secara optimal. Selanjutnya, pada pilar Iklim Usaha dan Keamanan Siber, masih terdapat kerentanan keamanan data yang ditunjukkan oleh data bahwa 55,07% masyarakat belum pernah mengganti kata sandi akun digitalnya (BSSN, 2025), yang mencerminkan rendahnya kesadaran keamanan siber.

Pada pilar Riset dan Inovasi, meskipun Indonesia termasuk negara dengan tingkat adopsi kecerdasan artifisial (AI) yang cukup tinggi di kawasan, yakni sebesar 24,6% dari organisasi, komitmen terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*) masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari jumlah peneliti yang hanya mencapai 396 orang per satu juta penduduk—jauh di bawah negara maju yang telah melampaui 8.000 peneliti per satu juta penduduk—serta pengeluaran R&D yang baru mencapai 0,3% dari PDB. Adapun pada pilar Pendanaan dan Investasi, nilai investasi sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh industri dalam negeri masih terbatas, yakni sebesar 1,1% dari PDB, sementara sejumlah negara lain telah mencapai sekitar 3% dari PDB. Tantangan pada masing-masing pilar tersebut menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang terintegrasi guna memastikan akselerasi dan keberlanjutan pengembangan ekonomi digital nasional.

b. Upaya Perbaikan IKU 1.1

Sebagai upaya perbaikan, akan ditempuh dengan berfokus pada penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Dalam aspek pengukuran kontribusi ekonomi digital terhadap PDB, koordinasi bersama Bappenas, BPS, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Prospera akan dilanjutkan untuk menyepakati definisi pendekatan *narrow* dan *broad*, serta melakukan pemetaan awal kebutuhan data dan penyesuaian KBLI yang relevan dengan aktivitas digital.

Dalam mendukung pilar Stranas Pengembangan Ekonomi Digital, fungsi koordinasi akan diperkuat dengan identifikasi isu prioritas infrastruktur digital untuk dibahas dalam forum koordinasi lintas K/L, mendorong sinergi program peningkatan talenta digital, serta memperkuat koordinasi kebijakan keamanan siber bersama instansi terkait guna meningkatkan kesadaran dan tata kelola perlindungan data, memfasilitasi penyelarasan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi digital. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan sesuai kewenangan sebagai koordinator kebijakan guna meningkatkan konsistensi, efektivitas, dan keterukuran pelaksanaan pengembangan ekonomi digital secara nasional.

IKU 1.2

Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional merupakan *tool* untuk mengukur tingkat keberhasilan atau capaian penguatan perdagangan nasional melalui proses sinkronisasi, koordinasi dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Dewan Pengarah memiliki tugas-tugas antara lain:

- A. Merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsive;
- B. Menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor;
- C. Menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan
- D. Mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor.

Dan untuk mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, telah disusun Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Melalui Keppres dan Kepmenko Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, akan dilakukan perumusan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif, menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan, serta menyelesaikan permasalahan yang ada agar peningkatan nilai ekspor nasional pada tahun 2025 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025, Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB ditargetkan tumbuh sebesar 21,7%. Berdasarkan data BPS, realisasi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB adalah sebesar 22,85%. Dengan demikian, capaian IKU 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB sudah melebihi target atau sebesar 105,30%. Perlu diperhatikan bahwa nilai ini merupakan angka proyeksi berdasarkan realisasi pada triwulan III tahun 2025.

Adapun realisasi Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB pada Tahun 2025 adalah sebesar 22,85% dengan nilai ekspor barang dan jasa Rp5.442,3 triliun dan nilai pendapatan domestik bruto nasional sebesar Rp23.821,1 triliun. Dari proyeksi tersebut, angka Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa pada Tahun 2025 diperkirakan minimal sebesar 22,85%, sehingga kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diperkirakan mencapai 105,30% yang didapat dari persentase realisasi Tahun 2025 dibanding dengan target Tahun 2025. Perbandingan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB (%)*	21,42	24,50	21,75	22,18	22,85%

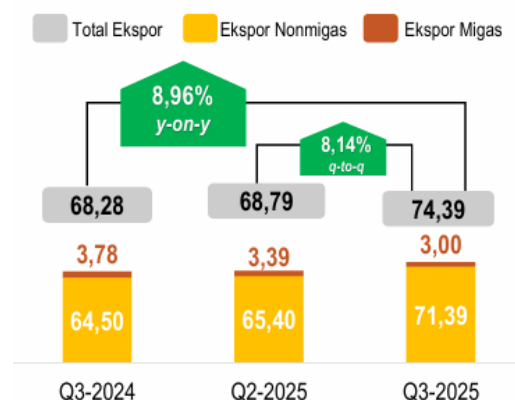
*Sumber: Data BPS (diolah)

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB nasional dari tahun 2023 cenderung naik. Pada tahun 2025, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03% (yoy) dengan sektor dominan adalah nonmigas (71,39%). Neraca perdagangan Indonesia juga mencatatkan tren surplus selama 5 tahun terakhir yaitu sejak Mei 2020 (68 bulan berturut-turut) dengan nilai pada tahun 2025 sebesar USD 41,05 miliar.

Surplus perdagangan nonmigas sepanjang tahun 2025 sebagian besar ditopang oleh lima komoditas utama, yaitu lemak dan minyak hewani/nabati (USD 34,06 miliar), bahan bakar mineral (USD 28,01 miliar), besi dan baja (USD 18,44 miliar), produk nikel dan barang daripadanya (USD 9,63 miliar), serta alas kaki (USD 6,66 miliar).

Tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Kontribusi ketiga negara ini mencapai 42,28% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Tahun 2025. Tiongkok masih menjadi pasar ekspor utama komoditas non migas Indonesia dengan nilai mencapai USD 64,82 miliar (24,02%), disusul Amerika Serikat sebesar USD 30,96 miliar (11,47%) dan India sebesar USD 18,32 miliar (6,79%).

Gambar 3.6
Perkembangan Nilai Ekspor (Miliar USD)



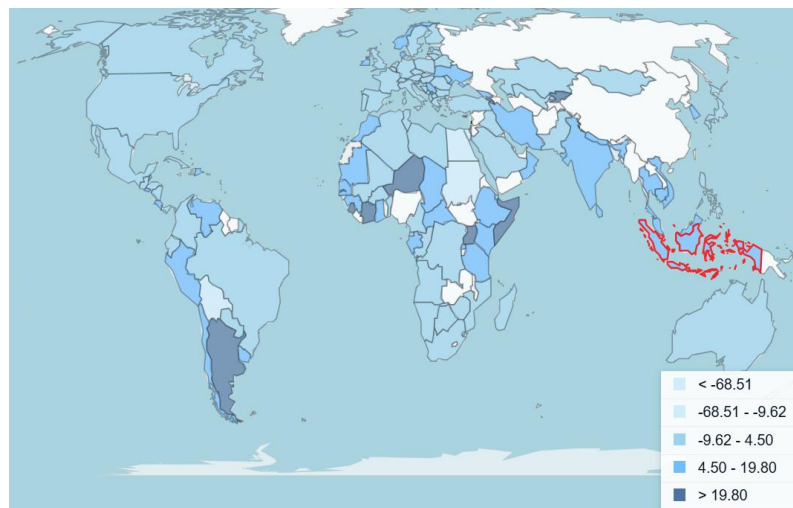
Sumber: BPS

Berdasarkan data Bank Dunia, persentase pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2024 (sebesar 6,5% yoy) termasuk ke dalam 5 besar diantara negara-negara ASEAN lainnya, yaitu dibawah Vietnam (15,5%), Kamboja (14,4%), Malaysia (8,3%), dan Thailand (7,8%). Angka ini jauh di atas rata-rata dunia sebesar 2,7%.

Komoditas ekspor unggulan negara ASEAN berbeda-beda. Sebagai contoh, ekspor Indonesia didominasi dari komoditas sumber daya alam dan manufaktur sederhana seperti lemak dan minyak hewani/nabati, bahan bakar mineral, besi dan baja, produk nikel, serta alas kaki. Vietnam, di sisi lain, dikenal sebagai pabrik manufaktur global dengan ekspor besar di

sektor elektronik, tekstil, dan produk industri. Sedangkan Malaysia dan Thailand lebih banyak ekspor dalam sektor elektronik, teknologi, otomotif, dan re-eksport (khususnya Singapura sebagai hub perdagangan).

Gambar 3.7
Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Berbagai Negara

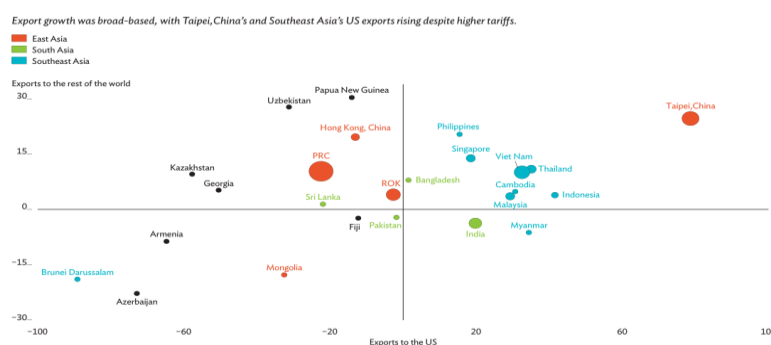


Sumber: World Bank

Pada awal kuartal-2 tahun 2025, Amerika Serikat (AS) mengumumkan kebijakan proteksionis yang bertujuan menyeimbangkan defisit perdagangan dalam negerinya dengan mengenakan tarif pada barang-barang impor atau disebut tarif timbal balik (*reciprocal tariff*). Sejak saat itu, pemerintah Indonesia dan AS secara intensif terus melakukan perundingan sehingga pada Juli 2025 telah diterbitkan *joint statement* yang mengumumkan penurunan tarif resiprokal bagi Indonesia dari 32% menjadi 19%, dan pada Desember 2025 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan United States Trade Representative (USTR) telah menyepakati substansi yang diatur dalam dokumen perundingan perdagangan resiprokal (*Agreements on Reciprocal Trade/ART*) yang akan ditandatangani oleh Presiden RI dan Presiden AS pada 2026.

Melalui perjanjian perdagangan resiprokal, Indonesia berkomitmen untuk memberikan akses pasar untuk produk AS, mengatasi kendala isu-isu hambatan non tarif, kerja sama dalam perdagangan digital dan teknologi, keamanan nasional, dan juga kerja sama komersial. Sementara itu, AS berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh AS seperti minyak kelapa sawit, cocoa, kopi, teh, dan lainnya.

Gambar 3.8
Perubahan Ekspor ke AS dan Negara-negara Lain di Dunia, Mei–Juli 2025 (yoy)



Sumber: Asian Development Bank (ADB)

*Besar lingkaran berdasar proporsional dengan nilai ekspor ke AS, kecuali jika nilainya lebih rendah dari \$3,6 miliar.

Untuk memperkuat posisi Indonesia di perdagangan global dan meminimalisir dampak tarif resiprokal AS, pemerintah terus membangun berbagai kerja sama internasional yang strategis. Beberapa diantaranya yang menjadi perhatian dan memiliki potensi signifikan bagi perluasan akses pasar serta penguatan daya saing nasional yakni Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), Indonesia-Canada Comprehensive Economic Agreement (ICA-CEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), Two Countries Twin Parks (TCTP).

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga mendorong diversifikasi pasar ekspor melalui perluasan kerja sama dagang dengan mitra non-tradisional. Salah satu langkah strategis yang telah ditempuh yakni penandatanganan *Free Trade Agreement* antara Indonesia dan *Eurasian Economic Union* (I-EAEU FTA) pada 21 Desember 2025. Perjanjian ini membuka akses pasar ke kawasan Eurasia yang mencakup Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia, dengan total populasi hampir 180 juta jiwa dan Produk Domestik Bruto mencapai USD2,56 triliun. Lebih dari 95% nilai perdagangan dalam perjanjian tersebut memperoleh preferensi tarif, dengan rata-rata bea masuk mendekati nol persen.

Melalui FTA tersebut, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor berbagai komoditas unggulan seperti CPO dan turunannya, alas kaki, kopi, kakao, tekstil, produk perikanan, serta jasa berbasis digital dan ekonomi kreatif. Selain memperkuat diversifikasi pasar, perjanjian tersebut juga diproyeksikan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,36% dan memperkuat daya saing produk bernilai tambah.

Untuk mempercepat pemanfaatan perjanjian dagang, Pemerintah mendorong pembentukan *business council* dan penyelenggaraan *business forum* dengan negara mitra, termasuk kawasan Eurasia dan Uni Eropa. Langkah tersebut bertujuan memfasilitasi komunikasi langsung antar pelaku usaha, serta mempercepat implementasi kerja sama perdagangan tanpa menunggu selesainya proses ratifikasi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara penguatan ekonomi domestik dan pembukaan akses pasar global. Dengan memperluas jaringan perjanjian dagang internasional, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor, memperluas peluang bagi pelaku usaha termasuk UMKM, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya adalah koordinasi kebijakan pengembangan ekspor, optimalisasi pemanfaatan fasilitasi perdagangan internasional oleh pelaku usaha, optimalisasi kebijakan penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, koordinasi perubahan regulasi Neraca Komoditas sebagai dasar penerbitan perizinan ekspor dan impor, koordinasi penyelesaian hambatan ekspor dan impor, koordinasi penyelarasan daftar komoditas prioritas dalam negosiasi tarif resiprokal, serta koordinasi dan sinkronisasi bahan perjanjian kerja sama internasional.

Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, sosialisasi dan audiensi dengan pelaku usaha, kunjungan kerja ke pelaku usaha, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan, dan mengetahui kebijakan terbaik dalam peningkatan ekspor.

Kebijakan	❖ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 613 Tahun 2025 tentang Komite Nasional Fasilitas Perdagangan. ❖ Terlaksana Perencanaan Kegiatan Pengembangan Ekspor Tahun 2026 dilaksanakan melalui penguatan tim Satgas P2SP (Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah) yang dilaksanakan melalui beberapa rapat koordinasi pada triwulan IV.
Rapat Koordinasi	❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Teknis Optimalisasi Dashboard Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan Impor sesuai surat nomor PI.02.02/02/D.III.M.EKON.3/01/2025. ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023 telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025 dan 25 Februari 2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Review Usulan Perubahan KMK 272 Tahun 2023 sesuai surat nomor PI.02.01/04/D.III.M.EKON.3/02/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Tindak Lanjut Usulan Perubahan Lartas Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi sesuai surat nomor PI.02.02/06/D.III.M.EKON.3/02/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Penguatan Implementasi Indonesia Single Risk Management (ISRM) Tahun 2025 sesuai surat nomor PI.02.02/05/D.III.M.EKON.3/02/2025. ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Keppres dan Kepmenko Satgas PEN sesuai surat nomor PI.02.01/09/D.III.M.EKON.3/03/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Spesifikasi/Klasifikasi Dump Truck untuk Penggunaan Off-Highway sesuai surat nomor PI.02.03/10/D.III.M.EKON.3/03/2025. ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Revisi Kepmenko Nomor 168/2023 tentang KNFP sesuai surat nomor PI.02.02/8/D.III.M.EKON.3/03/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Tindak Lanjut Surat Kedutaan Besar Amerika Serikat Terkait Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk PP Copolymer yang berasal dari Republik Korea, Vietnam, Malaysia, dan Singapura sesuai surat nomor PI.02.02/16/D.III.M.EKON.3/06/2025. ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor untuk Konsentrat Rutil dan Limenit sesuai Nota Dinas Nomor PI.02.01/129/D.III.M.EKON.3/07/2025.

FGD	❖ Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sesuai Nota Dinas Nomor PI.02.01/163/D.III.M.EKON.3/09/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Tindak Lanjut Permohonan Prakarsa SNI Kemasan Aseptik Multilapis dari Kertas dan Karton sesuai surat nomor PI.02.03/26/D.III.M.EKON.3/10/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA sesuai surat nomor PI.02.01/25/D.III.M.EKON.3/10/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Perkembangan Isu Ekonomi dan Perdagangan antara Indonesia dan India sesuai undangan Nomor PI.02.02/28/D.III.M.EKON.3/10/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Perkembangan Implementasi Tahap I dan Tindak Lanjut Roadmap Sistem Informasi Terintegrasi DHE SDA sesuai surat Nomor PI.02.01/35 D.III.M.EKON.3/12/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan pengeluaran barang dan pembebasan pajak dari Kawasan Berikat untuk bantuan bencana alam sesuai surat nomor PI.02.03/33/D.III.M.EKON.3/12/2025.
	❖ Koordinasi terkait Evaluasi Implementasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025, 14 Januari 2025, 15 Januari 2025, 3 Februari 2025, 21 Januari 2025, 24 Februari 2025. ❖ FGD Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas Kepabeanan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Ekspor dan Hilirisasi tanggal 3 Juni 2025 sesuai surat nomor PI.02.01/15/D.III.M.EKON.2/05/2025. ❖ FGD Evaluasi Penerbitan SKA dalam Mendukung Ekspor Nasional sesuai Nota Dinas Nomor PI.02.01/147/D.III.M.EKON.3/07/2025. ❖ Workshop Pemanfaatan GTAP sesuai undangan Nomor PI.02.02/32/D.III.EKON.3/10/2025.
	❖ Sosialisasi dan monev terkait Evaluasi Implementasi Kebijakan DHE-SDA pada tanggal 11 Juni 2025 di Surabaya, 18 Juni 2025 di Semarang, 11 Juli 2025 di Jakarta, 24 Juli di Makassar, dan 14 Agustus 2025 di Balikpapan.
Sosialisasi	

a. Hambatan dan Kendala IKU 1.2

Upaya peningkatan kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tidak terlepas dari beberapa kendala, seperti adanya kebijakan tarif AS yang dikhawatirkan menyebabkan penurunan daya saing dan volume ekspor produk Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik; terjadinya fenomena *frontloading* ekspor ke AS dimana eksportir mempercepat

pengiriman untuk menghindari tarif baru; melemahnya permintaan global dimana negara-negara mitra dagang utama mengalami perlambatan yang akan menghambat laju ekspor secara keseluruhan.

b. Upaya Perbaikan IKU 1.2

Melihat perkembangan dinamika ekonomi dan geopolitik global yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bidang ekspor, sesuai arahan Presiden untuk mendorong percepatan Program Paket Ekonomi, Stimulus Ekonomi, dan program strategis lainnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan Keputusan Menteri tentang Sekretariat, Kelompok Kerja dan Unit Pendukung dalam Rangka Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) dengan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebagai Wakil Ketua I Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (*Debottlenecking*). Selain itu, beberapa kebijakan dilakukan untuk mendorong pengembangan dan produksi bahan baku serta komponen penolong di dalam negeri, penguatan insentif fiskal dan proteksi impor, penguatan stimulus fiskal dan kebijakan ekonomi, penguatan promosi seperti pameran dagang internasional, misi dagang dan promosi digital yang lebih terarah, serta mempercepat negosiasi dan ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dan dengan usaha akses Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan tarif yang lebih rendah.

IKU 1.3

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB



Kinerja sektor perdagangan dalam negeri merupakan salah satu indikator kemajuan suatu perekonomian, terutama dalam menjaga stabilitas distribusi barang, mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor. Kinerja sektor perdagangan dalam negeri meliputi peningkatan transaksi perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga dan pasokan barang, dan penyerapan produksi dalam negeri. Perdagangan besar dan eceran bukan hanya mencerminkan aktivitas transaksi antar pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi indikator vital terhadap kinerja ekonomi daerah melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan nilai kontribusi sektor ini menandakan semakin kuatnya daya beli masyarakat, berkembangnya jaringan distribusi, serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem logistik dan niaga di wilayah tersebut.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB merupakan persentase dari nilai perdagangan besar dan eceran dibandingkan dengan PDB Nasional secara keseluruhan. Sektor perdagangan besar maupun eceran, merupakan urat nadi perekonomian daerah dan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang krusial. Kinerja sektor ini secara langsung mencerminkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan di suatu wilayah. Pada tahun 2024, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor secara nasional berkontribusi 13,07% terhadap PDB Nasional, hanya di bawah Industri Pengolahan berdasarkan distribusi PDB menurut Lapangan Usaha.

Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB ditargetkan tumbuh sebesar 13,07% pada tahun 2026. Berdasarkan data BPS, realisasi Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 13,17%. Dengan demikian, capaian IKU 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB sudah melebihi target atau sebesar 100,76%.

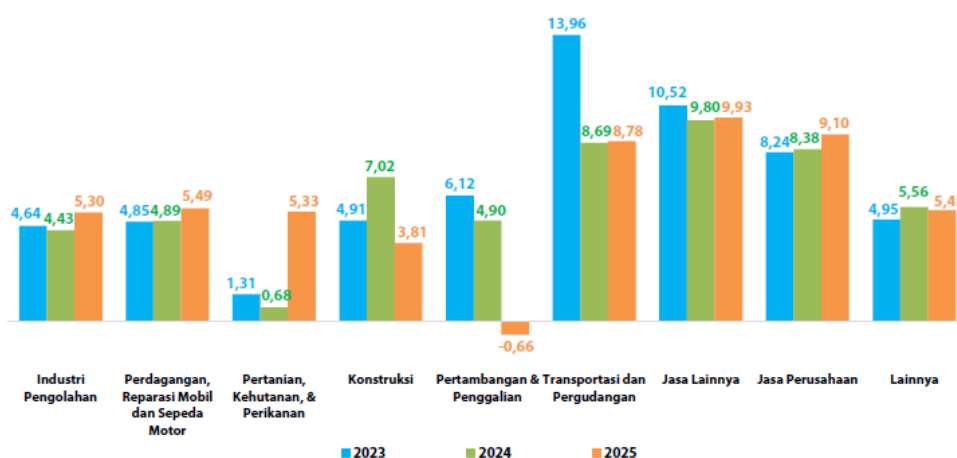
Berdasarkan kelompok, Perdagangan Besar Dan Eceran merupakan gabungan Reparasi, Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor (Kategori G). Sebagai upaya menjaga validitas dan kredibilitas data, telah dikoordinasikan permintaan pemisahan data PDRB Kategori G1 dan G2 ke BPS, namun data tersebut belum didapatkan. Perbandingan capaian Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB (%)*	12,96%	12,85%	12,94%	13,07%	13,17%**

*Sumber: Data BPS (diolah)

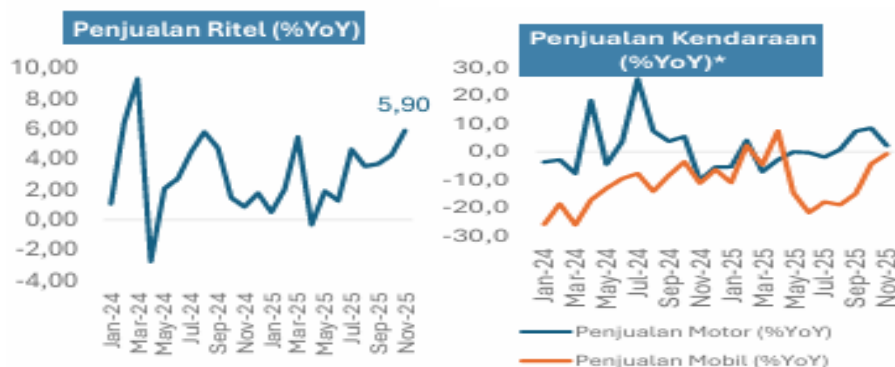
Gambar 3.9
Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha (YoY)



Sumber: BPS

Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada triwulan III tahun 2024 sebesar 4,82% dibanding tahun sebelumnya dan meningkat menjadi 5,49% pada triwulan III tahun 2025. Perdagangan besar dan eceran dipengaruhi oleh dua kelompok besar yaitu perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya yang mengalami perlambatan sebesar -0,37% (yoy) dan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor sebesar 6,7% (yoy).

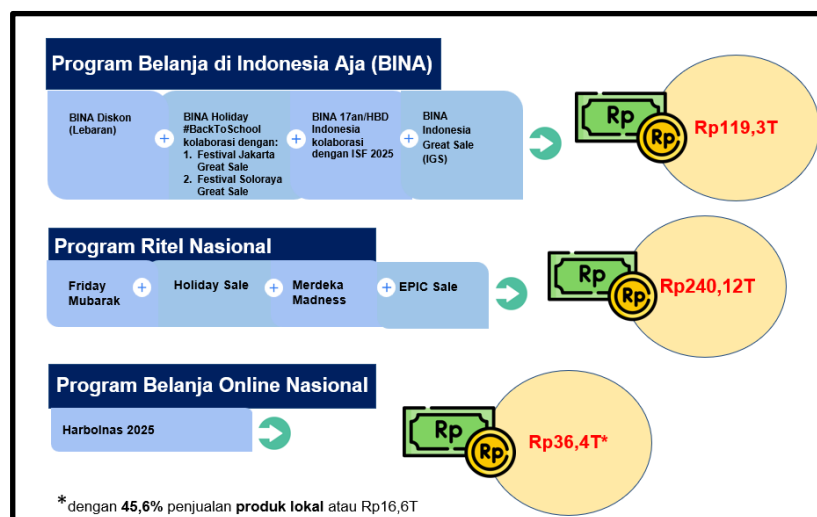
Gambar 3.10
Pertumbuhan Penjualan Ritel dan Penjualan Kendaraan Bermotor (YoY)



Pertumbuhan penjualan ritel dan penjualan kendaraan bermotor sampai dengan November 2025 tumbuh positif (yoy). Penjualan ritel di bulan Maret merupakan capaian tertinggi, yaitu bertepatan dengan bulan Ramadhan, serta menjelang akhir tahun pertumbuhan semakin stabil yang mencerminkan pemulihan daya beli dan pergeseran pola belanja menjelang musim liburan.

Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDB memiliki tren naik sejak 2022. Peningkatan ini, secara umum menunjukkan ketahanan konsumsi domestik dan inflasi yang terkelola. Diversifikasi dan modernisasi perdagangan yang sejalan dengan transformasi digital dan e-commerce, mengakibatkan perubahan perilaku belanja masyarakat dari sebelumnya luring menjadi daring. Salah satunya tercermin dengan pencapaian program Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada tahun 2025 sebesar Rp36,4 triliun dengan 45,6% diantaranya merupakan produk lokal.

Gambar 3.11
Realisasi Program Belanja Nasional Tahun 2025



Dalam rangka mendukung pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2025, pemerintah memandang perlunya pendekatan yang komprehensif dari berbagai sisi, meliputi aspek konsumen, pelaku usaha, serta peran pemerintah sendiri. Dari sisi konsumen, dukungan diwujudkan melalui upaya menjaga daya beli masyarakat, melakukan stabilisasi harga, memastikan ketersediaan produk yang aman untuk dikonsumsi, serta mengoptimalkan peran pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Sisi pelaku usaha tidak luput dari perhatian pemerintah dalam mendukung pertumbuhan perdagangan. Melalui program Paket Ekonomi 8+4+5, pemerintah berupaya menjaga daya

beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II-2025. Delapan program akselerasi program 2025 yaitu (i) Bantuan pemerintah program magang lulusan perguruan tinggi; (ii) PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata periode Oktober-Desember 2025; (iii) Bantuan pangan periode Oktober-November 2025; (iv) Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (UKK) dan jaminan kematian bagi bukan penerima upah (BPU) sektor transportasi selama 6 bulan; (v) program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan; (vi) Program Padat Karya Tunai (*Cash for Work*) Kemenhub dan KemenPU; (vii) Program Deregulasi; (viii) Program perkotaan: perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk Gig Economy.

Untuk mendukung hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital melalui Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga, telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya adalah program Belanja di Indonesia Aja (BINA), program Ritel Nasional (Friday Mubarak, Holiday Sale, Merdeka Madness, EPIC Sale), program Belanja Online Nasional (Harbolnas). Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, kunjungan kerja, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan perdagangan besar dan eceran.

Rapat Koordinasi	❖ Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Belanja Nasional Tahun 2025 sesuai surat undangan PI.04.02/02/D.III.M.EKON/02/ 2025 ❖ Rapat Koordinasi Persiapan Press Conference dan Launching BINA Lebaran sesuai surat undangan PI.04.02/04/D.III.M.EKON.02/ 03/2025 ❖ Rapat Koordinasi penyelesaian kendala pencapaian target Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB Pulau Sumatera ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Pelatihan idEA e-UMKM di Kota Yogyakarta dan Pembahasan Dukungan HIPINDO dan APRINDO pada Jogja Great Sale sesuai Surat Nomor PI.04.02/36/D.III.M.EKON. 2/08/2025. ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Draft Kepmenko tentang Kelompok Kerja Timnas P3DN sesuai Surat Nomor PI.04.02/37/D.III.M.EKON. 2/08/2025. ❖ Rapat Koordinasi Program GASPOL kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Gerakan ASN Pakai Produk Lokal sesuai Surat Nomor PI.04.02/32,34,33,34/D.III. M.EKON.2/08/2025. ❖ Rapat Koordinasi Teknis Persiapan Kick-off Road to HARBOLNAS sesuai Surat Nomor PI.04.02/39/D.III.M.EKON. 2/08/2025. ❖ Rapat Koordinasi Evaluasi Program Belanja Nasional TW 1-3 dan Update Program Belanja Nasional untuk TW 4 2025 tanggal 5 November 2025 ❖ Rapat Koordinasi Evaluasi Program Belanja Nasional TW 1-3 dan Update Program Belanja Nasional untuk TW 4 2025 tanggal 5 November 2025 ❖ Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional tanggal 15 Desember 2025
------------------	--

	❖ Rapat Koordinasi Nasionalisasi Program GASPPOL kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 19 September 2025 ❖ Rapat Koordinasi Usulan Program GASPPOL menjadi bagian dari RB Tematik tanggal 19 September 2025 ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tingkat Menteri dalam rangka mendukung Gerakan ASN Pakai Produk Lokal tanggal 16 Oktober 2025 ❖ Rapat Koordinasi Evaluasi Program Belanja Nasional TW 1-3 dan Update Program Belanja Nasional untuk TW 4 2025 tanggal 5 November 2025 ❖ Rapat Koordinasi Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional tanggal 15 Desember 2025 ❖ Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Business Matching P3DN Tahun 2025 sesuai surat PI.04.02/01/D.III.M.EKON/01/2025
Kebijakan	❖ Koordinasi Penyelenggaraan Program Belanja Nasional
FGD	❖ FGD Evaluasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Langkah Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 ❖ FGD Koordinasi Kebijakan Perpajakan Pusat dan Daerah pada Sektor Ritel ❖ Sharing Session Tax Refund untuk Mendorong Program Belanja di Indonesia Aja (BINA)
Monitoring	❖ Kunjungan Kerja terkait Perdagangan Besar dan Eceran Ke KADIN Kota Surakarta, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, BPS Provinsi Sumatera Barat, Disperindag Provinsi Sumatera Barat dan Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat ❖ Kunjungan Kerja terkait Data Perdagangan Besar dan Eceran ke BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ❖ Kunjungan Kerja Terkait Permasalahan Ritel di DI Yogyakarta ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian DI Yogyakarta

a. Hambatan dan Kendala IKU 1.3

Upaya untuk mendorong pertumbuhan perdagangan besar dan eceran tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, misalnya meskipun ada peningkatan bantuan sosial dan stimulus akhir tahun, kenaikan harga komoditas (terutama makanan, minuman, dan tembakau) dapat menggerus daya beli riil masyarakat, terutama di segmen menengah ke bawah. Hal ini menjadi permasalahan krusial karena sektor perdagangan bergantung pada konsumsi rumah tangga. Kedua, pergeseran preferensi konsumen ke platform digital (*e-commerce*) mengubah struktur perdagangan eceran. Perdagangan eceran konvensional menghadapi tantangan adaptasi dan persaingan harga dari penjualan daring (*online*).

b. Upaya Perbaikan IKU 1.3

Berdasar kendala tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong program belanja nasional untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, ritel juga didorong untuk dapat lebih melibatkan produk UMKM dalam program belanja. Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui program pengembangan UMKM digital yang tersebar di berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya.



Sasaran Program 2

Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas diukur berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja yang terdiri dari:

- ❖ Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB
- ❖ Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Pada tahun 2025, realisasi capaian 2 (dua) indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 100,3 (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Program 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	%	8,27	10,30	80,29%
IKU 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	Hari	1,7	1,22	120%
Nilai Sasaran Strategis			100,15%	

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dalam mencapai sasaran program terwujudnya ekosistem logistik nasional yang berkualitas dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja.

IKU 2.1

Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB

Logistik merupakan faktor yang penting dan mempengaruhi daya saing, baik perusahaan maupun negara. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing pasar dengan mengurangi logistik, hal tersebut berpengaruh pada penurunan total barang dan jasa. Semakin besar daya saing pasar baik itu negara maupun perusahaan, maka akan berpotensi semakin menumbuhkan daya saing negara dalam bidang industri yang lebih besar dan dalam skala global.

Dari perspektif kebijakan negara, pengurangan biaya logistik nasional dapat dicapai dengan mengidentifikasi komponen secara individu. Hal ini menjadikan perhitungan biaya logistik penting dalam pembuatan kebijakan. Komponen utama logistik diantaranya adalah penyimpanan dan pergudangan, pengepakan dan unitisasi, transportasi, persediaan, informasi, dan pengendalian.

Biaya transportasi merupakan kontributor terbesar dari Biaya Logistik Nasional dimana biaya transportasi mencakup biaya transportasi primer dan sekunder menggunakan seluruh moda (darat, laut, udara). Biaya transportasi primer meliputi biaya perpindahan pengisian dari pabrik atau pusat distribusi ke pabrik atau pusat distribusi lain, dan pengangkutan inbound atas perpindahan barang jadi yang dibeli ke pabrik atau pusat distribusi. Biaya transportasi sekunder termasuk pembayaran kepada pengangkut, tunjangan penjemputan, peralatan truk atau kereta api dan biaya operasional.

Biaya transportasi terdiri dari biaya jasa angkutan darat selain angkutan rel, biaya jasa penunjang angkutan, biaya jasa angkutan laut, biaya jasa angkutan udara, biaya jasa pos dan kurir, biaya jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan, jasa angkutan rel.

Salah satu indikator negara maju adalah biaya transportasi dalam proses produksi dapat ditekan sampai dengan angka 8%. Hal ini akan berdampak terhadap daya saing dari barang kiriman. Oleh karena itu perlu strategi untuk mencapai target dari pemerintah agar visi negara maju 2045 dapat dicapai secara terukur. Biaya transportasi terbesar terdiri atas komponen biaya BBM hingga 40%-50%.

Biaya transportasi logistik di Indonesia masih cenderung tinggi, hal ini salah satunya disebabkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga distribusi barang dan komoditas kebanyakan dilakukan melalui angkutan antarpulau. Hal ini juga menyebabkan terjadinya kesenjangan biaya transportasi logistik antar regional. Wilayah timur cenderung memiliki biaya transportasi logistik yang lebih tinggi dibanding wilayah barat Indonesia. Ketidakseimbangan kargo dan kelangkaan armada di wilayah timur berkontribusi pada tingginya biaya ini, menandakan perlunya pengembangan pusat industri baru di wilayah timur untuk menyeimbangkan muatan kargo dan meningkatkan efisiensi logistik secara keseluruhan.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025, Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB ditargetkan sebesar 8,27% yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin rendah biaya logistik berarti semakin baik kinerjanya. Perbandingan capaian Persentase Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian IKU 2.2 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB

Keterangan	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025
Indikator Kinerja	Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional(*)				Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB
Target	40%	60%	75%	92%	8,27%
Realisasi	42%	69%	90,5%	95,2%	10,30% (**)
Kinerja	105%	115%	120%	103,4%	80,29%

(*) Indikator kinerja bersumber dari nomenklatur UKE-2 tahun 2021-2024 dan terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2025

(**) angka realisasi merupakan proyeksi

Perubahan indikator kinerja dari Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2021-2024) menjadi Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (2025) menandai transisi strategis dari pengukuran sektoral yang sempit menuju dampak ekonomi makro yang lebih komprehensif. Pada periode sebelumnya, pemerintah berfokus pada Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional, namun dalam menyongsong RPJMN 2025-2029, fokus dialihkan pada penurunan biaya logistik sebagai upaya memberikan nilai tambah pada perdagangan nasional.

Transisi ini menunjukkan standar evaluasi yang lebih ketat, di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari selesainya sebuah program, melainkan dari efektivitasnya dalam menurunkan angka biaya logistik nasional. Meskipun realisasi tahun 2025 berada di angka 10,30% dan belum mencapai target 8,27%, penetapan indikator ini menjadi fondasi penting bagi RPJMN periode baru untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara dengan daya saing logistik yang lebih kompetitif di tingkat global.

Penghitungan Biaya Logistik Nasional dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS yang dihitung menggunakan Tabel Input-Output (IO) dengan metode RAS yang akan disampaikan oleh BPS setiap tahunnya. Tabel ini menyajikan informasi makro tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antarsektor secara nasional. Berdasarkan perhitungan biaya logistik nasional, terdapat 3 (tiga) komponen utama yang diperhitungkan yakni biaya transportasi, biaya pergudangan dan penyimpanan persediaan (inventory), serta biaya administrasi. Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB tahun 2025 sebesar 10,30% masih menggunakan angka proyeksi yang dihitung mandiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengingat perhitungan realisasi Biaya Logistik Nasional tahun 2025 belum disampaikan secara resmi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Guna mendorong pencapaian target penurunan Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB, pada tahun 2025, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Penguatan Logistik Nasional melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan pilar strategi sebagai berikut: (i) Penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik; (ii) Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik; dan (iii) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Penguatan Logistik Nasional memuat strategi, program, serta rencana aksi lintas kementerian/lembaga (18 kementerian/lembaga). Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk dapat menurunkan persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto sesuai target dalam dokumen perencanaan nasional serta peningkatan kinerja logistik nasional dalam indikator kinerja logistik global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku pemrakarsa RPerpres Penguatan Logistik Nasional terus melakukan langkah-langkah koordinatif dalam rangka memenuhi fokus yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, melalui antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan rapat-rapat koordinasi teknis dalam rangka penyusunan RPerpres tersebut. Sampai dengan saat ini, tahapan harmonisasi telah diselesaikan, selanjutnya menunggu penetapan resmi dari Bapak Presiden RI.

Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, kunjungan kerja, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan dan kebijakan untuk mendukung penurunan biaya transportasi logistik.

Rapat Koordinasi	❖ Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I dan Eselon II pembahasan RPerpres tentang Penguatan Logistik Nasional tahun 2025 pada tanggal: 13 dan 24 Januari; 11, 12, 17, 24 Februari; 14 dan 25 Maret; 25, 26, 30 Juni; 1, 8, 10, 14, 22, 30 Juli; 4, 8, 11 Agustus; 10 September. ❖ Meaningful participation RPerpres tentang Penguatan Logistik Nasional pada tanggal 4 Juli 2025 ❖ Rapat koordinasi Digitalisasi Logistik dalam kaitannya dengan Biaya Logistik Nasional pada tanggal 22 Oktober 2025 dan 16 Desember 2025 ❖ The 111th Meeting of The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) and The 38th Logistics and Transport Services Sectoral Working Group (LTSSWG) Meeting tanggal 7-8 November 2025
FGD	❖ Diskusi Kelompok Terpumpun RPerpres tentang Penguatan Logistik Nasional pada tanggal 24 Juli 2025

a. Kendala dan Hambatan IKU 2.1

Upaya untuk mendorong penurunan biaya transportasi logistik terhadap PDB tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Belum terintegrasinya kawasan ekonomi/industri dengan simpul transportasi (pelabuhan/terminal/bandara) sehingga diperlukan biaya tambahan untuk transportasi darat dengan jarak tempuh yang cukup jauh, ditambah lagi berbagai hambatan lainnya seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan pungli di beberapa wilayah.
2. Fluktuasi harga bahan bakar dan ketersediaan BBM bersubsidi untuk transportasi logistik tidak merata yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan mematikan penyedia jasa pengangkutan skala UMKM serta adanya perbedaan perlakuan perpajakan untuk pembelian BBM antara kapal asing dan kapal dalam negeri yang menurunkan daya saing pelaku usaha pelayaran dalam negeri.
3. Belum optimalnya layanan multimoda karena belum diterapkannya sistem tarif tunggal (single tariff) yang terintegrasi.
4. Belum semua layanan logistik terdigitalisasi.

5. Kompetensi dan keahlian SDM logistik belum sesuai dengan kebutuhan industri logistik.

b. Upaya Perbaikan IKU 2.1

Upaya perbaikan terus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Percepatan Penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional.
2. Penerapan kebijakan short sea shipping.
3. Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik.
4. Penyesuaian peta okupasi bidang logistik dan rantai pasok.

IKU 2.2

Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan



Dalam sistem logistik sebuah negara, pelabuhan laut memainkan peran strategis sebagai pintu masuk dan keluar barang baik untuk perdagangan domestik maupun internasional. Salah satu indikator penting yang menggambarkan kinerja operasional pelabuhan adalah waktu perputaran kapal — atau *turnaround time* — yakni durasi yang diperlukan sebuah kapal sejak tiba di dermaga sampai selesai proses bongkar muat dan berlayar kembali. Waktu perputaran ini mencakup seluruh rangkaian pelayanan, mulai dari sandar kapal, bongkar muat kargo, proses kepabeanan, hingga administrasi lainnya yang terkait dengan pergerakan barang.

Di Indonesia, meskipun ada perbaikan kinerja di beberapa pelabuhan utama melalui transformasi digital dan standarisasi layanan, rata-rata waktu kapal tinggal di pelabuhan (*turnaround time*) masih menunjukkan angka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga dan standar global. Berdasarkan laporan dari World Bank pada tahun 2023, rata-rata waktu perputaran kapal di pelabuhan mencapai 1,8 hari, dimana masih tertinggal dari Filipina (1,3 hari), Myanmar (1,2 hari), Thailand (1 hari).

Gambar 3.12

Kelompok-Indikator Sub Indikator

KELOMPOK-INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ID	PH	VN	MY	TH	SG	CA
	Container Shipping - Turnaround Time at Port Mean	1,8	1,3	0,9	1,2	1	1,2	0,9
	Import Delays - Port Dwell Time Mean	3,2	6,2	5,3	5,8	4,4	3	3,6
	Export Delays - Port Dwell Time Mean	3,5	4,6	4	4,4	5,1	3,1	2,4
	Aviation - Import delays-airfreight	2,4	2,4	2,4	0,8	2,1	0,3	3,5
	Postal - Import delays-postal	12,3	18,9	8,2	5,2	2,6	1,9	4

Sumber: Laporan LPI 2023, diolah

Rata-rata waktu perputaran yang masih panjang ini tidak hanya memperlambat layanan pelabuhan, tetapi juga berdampak langsung terhadap biaya logistik. Dalam konteks global, waktu tunggu kapal di banyak pelabuhan maju cenderung lebih pendek karena proses bongkar muat serta layanan administratif yang lebih cepat dan terintegrasi. Di Indonesia, meskipun beberapa reformasi sudah dijalankan, durasi *port stay* masih cukup signifikan sehingga berpotensi menurunkan *sailing time* — waktu efektif kapal dalam perjalanan — dan meningkatkan biaya operasional pelayaran.

Akibatnya, panjangnya waktu perputaran kapal ini menjadi salah satu kontributor terhadap biaya logistik nasional yang masih tergolong tinggi, serta berpengaruh pada *competitiveness* atau daya saing logistik Indonesia di kancah regional dan global. Efisiensi logistik yang rendah menyerap sumber daya lebih besar, memperlambat arus barang, dan mengurangi kecepatan respon terhadap permintaan pasar.

Upaya untuk mempercepat waktu perputaran kapal telah dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk digitalisasi proses layanan pelabuhan, integrasi sistem, serta standarisasi operasional yang bertujuan untuk menyederhanakan proses layanan dan mempercepat proses bongkar muat. Namun, perbaikan tersebut masih perlu ditingkatkan secara menyeluruh dan sistematis agar dapat menghasilkan efisiensi logistik nasional yang signifikan dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa efektivitas layanan pelabuhan dan efisiensi sistem logistik nasional menjadi isu kunci yang memengaruhi biaya serta daya saing ekonomi. Hambatan struktural seperti duplikasi proses administratif dan dokumen, kurangnya integrasi moda transportasi dan rantai pasok, serta kebutuhan akan dukungan teknologi informasi yang menyeluruh masih menjadi tantangan utama dalam implementasi logistik nasional sampai dengan tahun 2025.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2025, penetapan target IKU Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan ditargetkan sebesar 1,7 hari berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029. Target rata-rata waktu perputaran di pelabuhan tahun 2025 adalah 1,7 hari yang merupakan nilai maksimal yang perlu dicapai, dimana semakin cepat waktu perputaran berarti semakin baik kinerjanya. Perbandingan target dan capaian rata-rata waktu perputaran di pelabuhan dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian IKU 2.2 Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan

Keterangan	2021(*)	2022(*)	2023(*)	2024(*)	2025
Indikator Kinerja	Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional(*)				Rata-Rata Waktu Perputaran di Pelabuhan
Target	40%	60%	75%	92%	1,7 hari
Realisasi	42%	69%	90,5%	95,2%	1,22 hari(**)
Kinerja	105%	115%	120%	103,4%	120%

(*) Indikator kinerja bersumber dari nomenklatur UKE-2 tahun 2021-2024 dan terdapat perubahan indikator kinerja pada tahun 2025

(**) angka realisasi merupakan proyeksi

Perubahan indikator kinerja dari Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2021-2024) menjadi Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (2025) menandai transisi strategis dari pengukuran sektoral yang sempit menuju dampak

ekonomi makro yang lebih komprehensif. Pada periode sebelumnya, pemerintah berfokus pada Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional, namun dalam menyongsong RPJMN 2025-2029, fokus dialihkan pada kinerja pelabuhan melalui indikator rata-rata waktu perputaran sebagai upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi logistik yang berdampak pada penurunan biaya logistik nasional.

Transisi ini menunjukkan standar evaluasi yang lebih ketat, di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari selesainya sebuah program, melainkan dari efektivitas waktu perputaran di pelabuhan sebagai upaya menurunkan angka biaya logistik nasional. Realisasi rata-rata waktu perputaran di pelabuhan tahun 2025 berada di angka 1,22 hari atau 120% dari target 1,7 hari yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Namun angka realisasi ini masih merupakan angka proyeksi perhitungan mandiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Angka realisasi riil masih menunggu laporan kinerja logistik global dari World Bank.

Indikator kinerja logistik internasional akan mengikuti indikator dalam perhitungan *Logistics Performance Index* (LPI) oleh Bank Dunia, meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time at Port*; (ii) *Container indicator: Container Dwell Time Import & Export*; (iii) *Container Indicator: Consolidated Dwell Time Import & Export*; (v) *Postal indicator: Postal Delivery Time Import*; (vi) *Airport indicator: Aviation Dwell Time Import*. Selain itu, Indikator kinerja logistik domestik meliputi: (i) *Port indicator: Ship Turnaround Time Domestic*; (ii) *Inter-Island indicator: Container Dwell Time Outbound & Inbound*.

Pada tahun 2025, Kemenko Perekonomian menginisiasi pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional dengan asistensi dari Bank Dunia guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi melalui dimensi waktu yang dikembangkan mengikuti kaidah *best practice international* (pendekatan *Supply Chain Tracking Data/Logistic Performance Index*) serta untuk mendukung pembuatan kebijakan di bidang logistik dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional terhadap PDB.

Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, kunjungan kerja, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan dan kebijakan untuk mendukung penurunan biaya transportasi logistik.

Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi pembahasan indikator kinerja logistik nasional tahun 2025, pada tanggal: 25 Maret; 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16 Mei; 16, 23 Juni.
FGD	FGD Overview Pengembangan Indikator Kinerja Logistik Nasional pada tanggal 1, 6, dan 12 Agustus 2025
Monitoring dan Evaluasi	❖ Kunjungan kerja dalam rangka pembahasan indikator pelabuhan dalam Dashboard Kinerja Logistik Nasional di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 8 Mei 2025 ❖ Kunjungan kerja dalam rangka pembahasan indikator pelabuhan dalam Dashboard Kinerja Logistik Nasional di Pelabuhan Patimban pada tanggal 16-17 September 2025

a. Kendala dan Hambatan IKU 2.2

Upaya pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari beberapa kendala, antara lain:

1. Kinerja pelabuhan yang belum optimal dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Hal ini tercermin pada tingginya Turn Around Time (TAT), khususnya untuk pelayanan kargo domestik.

2. Kepadatan dan antrean kapal di pelabuhan utama serta masalah lalu lintas di akses masuk dan keluar pelabuhan yang kurang lancar.
3. Perhitungan Ship Turnaround Time (STAT), pelabuhan nasional belum memiliki polygon boundaries yang selaras dengan metodologi LPI Bank Dunia sehingga perlu dilakukan penyesuaian polygon. Selain itu terdapat gap dalam penggunaan data dimana Indonesia masih manual belum menggunakan data Automatic Information System (AIS).

b. Upaya Perbaikan IKU 2.2

Upaya perbaikan terus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

1. Percepatan Penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional.
2. Menyiapkan framework indikator kinerja logistik ditingkat operasional dengan pendekatan supply chain tracking data berbasis digital.
3. Percepatan integrasi dan digitalisasi pelabuhan.



Sasaran Program 3

Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Literasi Keuangan.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 116,08 (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Program 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan	Indeks	57,25	66.46	116,08%
Nilai Sasaran Strategis			116,08%	

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dalam mencapai sasaran program terwujudnya peningkatan inklusi dan literasi keuangan dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja.

IKU 3.1

Indeks Literasi Keuangan



Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Literasi keuangan diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu (i) pengetahuan, (ii) keterampilan, (iii) keyakinan, (iv) sikap, dan (v) perilaku.

Penggunaan akun/layanan keuangan formal adalah penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, seperti jumlah rekening tabungan dan kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal, jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada penerbit uang elektronik, persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal. Literasi keuangan yang memadai mendorong meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu, serta perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mengukur indeks literasi keuangan konvensional dilakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Realisasi capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan konvergensi program yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pekerja migran, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), masyarakat di daerah 3T, pelajar/santri, dan pemuda sebagaimana kelompok sasaran yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Upaya dan program tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan yang turut melibatkan partisipasi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK), pemberdayaan hak properti masyarakat yang terintegrasi, intermediasi fungsi lembaga keuangan dengan *branchless office* dan digitalisasi keuangan, elektronifikasi program pemerintah bagi kelompok rentan dan pelaku UMK melalui program perlindungan sosial dan subsidi pemerintah, penguatan perlindungan konsumen sektor keuangan dan pelaksanaan *market conduct*, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan infrastruktur dasar dan teknologi informasi yang mendukung literasi keuangan.

Tabel 3.14
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

Indeks	Metode	Hasil Survei
Literasi	Keberlanjutan	66,46%
	Cakupan DNKI	66,64%
Inklusi	Keberlanjutan	80,51%
	Cakupan DNKI	92,74%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen.

Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia diukur sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. SNLIK Tahun 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk yang kedua kali, setelah SNLIK Tahun 2024. Kerja sama dimaksud untuk mendapatkan gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan Indonesia dari dua sudut pandang yaitu dengan mempertimbangkan evaluasi pada pelaksanaan SNLIK sebelumnya dan kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang lebih komprehensif.

Penghitungan SNLIK Tahun 2025 dilakukan menggunakan dua metode. Metode pertama, disebut sebagai Metode Keberlanjutan, adalah metode perhitungan yang dilakukan dengan cakupan sembilan sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pegadaian, Lembaga Keuangan Mikro, *Fintech Lending* (Pindar), PT Permodalan Nasional Madani) dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) sebagaimana cakupan pada SNLIK Tahun 2024 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan OJK.

Sementara itu, metode kedua, disebut sebagai Metode Cakupan DNKI, adalah metode penghitungan yang memperluas cakupan sektor keuangan dengan penambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto/PT Pos Indonesia/Lembaga Penjaminan/dan lain-lain).

Metode Keberlanjutan menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Sementara metode Cakupan DNKI menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen. Selanjutnya, baik melalui metode Keberlanjutan maupun Cakupan DNKI, literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen.

Pendataan rumah tangga sampel SNLIK Tahun 2025 dilakukan mulai 22 Januari hingga 11 Februari 2025 di 34 provinsi yang mencakup 120 kota/kabupaten termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). Jumlah responden SNLIK Tahun 2025 sebanyak 10.800 orang yang berumur antara 15 s.d. 79 tahun. SNLIK Tahun 2025 menggunakan parameter literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage) terhadap produk dan layanan keuangan.

Rapat Koordinasi

- ❖ Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Pembahasan Tindak Lanjut Komnas LIK tanggal 5 Desember 2025
- ❖ Rapat Koordinasi POKJA I: Edukasi DNKI di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2025
- ❖ Rapat Koordinasi POKJA IV: Pelayanan Keuangan Sektor Pemerintah DNKI di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2025
- ❖ Rapat Koordinasi terkait Akselerasi Percepatan Kepemilikan Akun Bank Berbasis Keluarga di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025
- ❖ Rapat Peluang Kolaborasi antara PIP dan S-DNKI dalam Peningkatan Inklusi Keuangan dalam bidang edukasi dan literasi

akses layanan keuangan/pembiayaan usaha bagi masyarakat segmen prioritas di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2025

- ❖ Rapat Koordinasi antar Pokja dan Sekretariat DNKI di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2025
- ❖ Rapat Persiapan *Strive Learning Network* di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2025
- ❖ Diskusi Implementasi Program Inklusi Keuangan Mendukung Keluarga Miskin Ekstrem di Bandung Barat pada tanggal 23 Juni 2025
- ❖ Rapat Lanjutan IKAD di Jakarta pada 17 Oktober 2025
- ❖ Rapat penyusunan RPP Komnas LIK bersama K/L di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1 Juli 2025
- ❖ Rapat PAK dan/atau nonkementerian RPP Komnas LIK pada 15 Juli 2025
- ❖ Rapat Pembahasan Nomenklatur Kelompok Kerja Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan pada Komnas LIK di Jakarta pada 22 Juli 2025
- ❖ Rapat Pembahasan tentang Fungsi Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan antara Komnas LIK BPKN dan OJK di Jakarta pada 6 Agustus 2025
- ❖ Rapat terkait Proyek *Promise II Impact* di Jakarta pada 10 September 2025
- ❖ Rapat Pembahasan Tindak Lanjut kerja Sama Sekretariat DNKI dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terkait Optimalisasi Edukasi Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi Masyarakat Prioritas pada 15 September
- ❖ Rakornas TPAKD 2025 di Balai Kartini pada 10 Oktober 2025
- ❖ Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 1 Edukasi Keuangan dan Pokja 5 Perlindungan Konsumen) pada 14 Oktober 2025
- ❖ Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 2 Hak Properti Masyarakat dan Pokja 7 Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan) pada 14 Oktober 2025
- ❖ Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 3 Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan) pada 15 Oktober 2025
- ❖ Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 4) pada 15 Oktober 2025
- ❖ Rapat Perubahan Kepmenko Nomor 122 Tahun 2021 tentang Tugas dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja DNKI (Pokja 6 Kebijakan dan Regulasi dan Sekretariat DNKI) 16 Oktober 2025
- ❖ Rapat Persiapan pelaksanaan *Strive Award* pada 17 Oktober 2025

	❖ Rapat Persiapan <i>Piloting</i> Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) Cirebon secara daring pada 4 November 2025 ❖ Rapat Pembahasan Draft Stranas LIK dan Arahkan Menko DNKK bersama MSC di Jakarta pada 4 Desember 2025 ❖ Rapat Tindak Lanjut RPP Komnas LIK pada 5 Desember 2025; ❖ Rapat Tindak Lanjut Harmonisasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (RPP Komnas LIK) dan arahan Presiden tentang pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan di Jakarta pada 11 Desember 2025 ❖ Rapat Pembahasan Rancangan Strategi Nasional Kesejahteraan Keuangan (SNKK) di Jakarta pada 18 Desember 2025 ❖ Rapat Pembahasan Penguatan Program Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) secara daring pada 29 Desember 2025 ❖ Rapat Teknis Persiapan FGD Penyusunan Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Kedua di Jakarta pada 5 November 2025 ❖ Rapat Pleno Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan secara daring pada 7 November 2025 ❖ Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan secara daring pada 13 November 2025 ❖ Rapat Perumusan Program dan Ide Kreatif bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 30 Desember 2025
FGD	❖ Sosialisasi Keuangan Inklusif bagi Anggota Koperasi Wanita di Surakarta pada tanggal 23 Januari 2025 ❖ <i>Creative Talk</i> dan Festival Inklusi Keuangan dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Banyumas di Banyumas pada tanggal 21 dan 22 Februari 2025 ❖ Sosialisasi Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, dengan tema Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2025 ❖ Sosialisasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2025 ❖ Monitoring dan Evaluasi Program Keuangan Inklusif Mendukung Keluarga Miskin Ekstrem di Bandung Barat pada tanggal 24 Juni 2025 ❖ Sosialisasi Program PINTAR dalam Pengentasan Kemiskinan bersama OJK dan Civitas Akademika FEB UIN Jakarta pada 1 Juli 2025 ❖ Diskusi panel Transformasi Pengusaha UMKM melalui Peran Literasi, Inklusi dan Keuangan Digital merupakan kegiatan kolaborasi DNKI bersama Strive dan Mercy Corps Indonesia pada 9 Juli 2025

- ❖ Sharing Experience Financial Inclusion from BBVA di Jakarta pada 12 Agustus 2025
- ❖ Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Binaan Sabuk KAJ di Gereja Santo Albertus Agung, Paroki Harapan Indah, Bekasi pada 25 Agustus 2025
- ❖ Launching Program PINTAR di Kuningan pada 29 Agustus 2025
- ❖ Diskusi Panel Transformasi Pengusaha UMKM melalui Peran Literasi, Inklusi dan Keuangan Digital di Malang pada 3 September 2025
- ❖ Rapat FGD terkait Data Nasional Terpilah Gender (DNTG) 2025 di Jakarta pada 17 Oktober 2025
- ❖ FGD Implementasi Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dan Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR) di Cirebon pada 31 Oktober 2025
- ❖ Diseminasi DNTG dan Inovasi Layanan Inklusi Keuangan Perempuan di Cirebon pada 31 Oktober 2025
- ❖ Launching Program PINTAR Kab. Cirebon pada 8 November 2025
- ❖ FGD StranasLIK Pokja 1 - Literasi Keuangan dan Pokja 2 - Inklusi Keuangan pada 11 November 2025
- ❖ FGD StranasLIK Pokja 3 - Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dan Pokja 5 - Infrastruktur dan Teknologi Informasi pada 12 November 2025
- ❖ FGD StranasLIK Pokja 4 - Kebijakan dan Regulasi dan Pokja 6 - Perlindungan Konsumen pada 13 November 2025
- ❖ FGD StranasLIK, Sekretariat pada 14 November 2025
- ❖ Konsultasi Publik RPP Komnas Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Bandung pada 23 Juli 2025
- ❖ FGD Stranas LIK di Hotel Vertu Harmoni pada 8 September 2025
- ❖ FGD DNTG kolaborasi bersama ADB di Jakarta pada 11 September 2025
- ❖ Audiensi Deputi dengan Bupati Kuningan terkait Tindak Lanjut Program PINTAR di Kabupaten Kuningan pada 17 September 2025
- ❖ *Brainstorming* Ekonomi dan Keuangan pada 23 Oktober 2025
- ❖ Audiensi Diskusi terkait Lanskap Perkembangan dan Regulasi Inklusi Keuangan Tahun 2026-2029 bersama J-PAL SEA – LPEM FEB UI di Jakarta pada 20 November 2025
- ❖ Audiensi *Brainstorming* Peluang Kerja Sama Koperasi dan Konsultan Investasi di Jakarta pada 21 November 2025
- ❖ Audiensi dengan ILO pada 21 Oktober 2025
- ❖ Fasilitasi Rapat Pembahasan *Legal Drafting* SK Tim IKAD secara daring pada 28 Oktober 2025
- ❖ Sarasehan dan Kunjungan Lapangan IKDP “Membangun Layanan Inklusi Keuangan Digital yang Responsif Gender” di Lumajang pada 5 November 2025
- ❖ Fasilitasi Pembahasan *Legal Drafting* terkait Inklusi Keuangan di Jakarta pada 20 November 2025

Monitoring dan Evaluasi

- ❖ Monev Program Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial di Kuningan pada 17 Juli 2025
- ❖ Kunjungan ke Lokasi Intervensi ILO di KPBS, Pangalengan, Bandung pada 24 Juli 2025
- ❖ *Official Visit to Indonesia of Vice President of the Swiss Confederation* di Pangalengan, Bandung pada 2 Oktober 2025

a. Hambatan dan Kendala IKU 3.1

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, yaitu terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara tingkat inklusi dan literasi keuangan di mana banyak masyarakat sudah memiliki produk keuangan misalnya rekening bank, tetapi belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengelola produk tersebut secara bijak. Begitupun dengan rendahnya literasi pada sektor non-bank. Literasi masyarakat masih didominasi oleh produk perbankan sehingga masyarakat gagal memanfaatkan produk non-bank untuk proteksi (asuransi) dan pengembangan aset (pasar modal), sehingga ketahanan finansial jangka panjang rumah tangga menjadi rapuh. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup jelas juga antara inklusi keuangan di perkotaan dengan pedesaan. Masyarakat di perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan keuangan formal, seperti perbankan dan pembiayaan, sementara masyarakat di pedesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan akses. Selanjutnya, lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

b. Upaya Perbaikan IKU 3.1

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan IV tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan antara lain: diperlukan intensifikasi penyelenggaraan edukasi, sosialisasi dan literasi keuangan bagi kelompok sasaran; inisiatif program yang secara spesifik menyasar kepada masyarakat desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan lokal; penguatan struktur DNKI menjadi Komite Nasional terkait peningkatan inklusi dan literasi keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sehingga koordinasi lintas K/L dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan terarah.



Sasaran Program 4

Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas diukur berdasarkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 100 (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.15
Capaian Sasaran Program 4 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4	3	100%
Nilai Sasaran Strategis			100%	

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dalam mencapai sasaran program terwujudnya kebijakan perniagaan dan ekonomi digital yang berkualitas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.



IKU 4.1

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputy diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah:

1. Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan
2. Pengembangan Ekspor Nasional
3. Penguatan Ekosistem Logistik Nasional
4. Pengembangan Ekonomi Digital
5. Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal business* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputy). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Tahapan Pertama: Identifikasi Permasalahan dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah ditetapkan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektifitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

Indeks efektifitas SKP

$$= 5\sqrt{(SKP \text{ AD } 1 \times SKP \text{ AD } 2 \times SKP \text{ AD } 3 \times SKP \text{ AD } 4 \times SKP \text{ AD } 5)}$$

Nilai Akhir Indeks Efektifitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Indeks SKP dan Rentang Nilai

Indeks	Kategori	Rentang Nilai
4	Sangat Baik	91-100
3	Baik	81-90
2	Cukup	71-80

Indeks	Kategori	Rentang Nilai
1	Kurang	<70

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital diperoleh dari akar lima dari Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Kebijakan di unit Eselon II: Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

Tabel 3.17
Persentase Efektivitas SKP Unit Kerja Asdep Tahun 2025

No	Unit Kerja Eselon II	Persentase Efektivitas SKP
1	Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	80
2	Asisten Deputy Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	85
3	Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional	80
4	Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital	85
5	Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan	80
Indeks Efektivitas SKP		81,96

Capaian Kinerja

Capaian kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 disajikan dalam ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Sasaran Program 4 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3	100%

Pada tahun 2025, realisasi Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu 81,96%. Pada IKU 4.1 Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di

Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital berada ditarget yang telah ditetapkan yaitu 3 dari 4 (Baik). Dengan demikian, capaian kinerja dari pengukuran indeks ini sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital atau stakeholder yang terkait layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan puas dengan layanan yang diberikan terkait dengan tugas dan fungsi utama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang perekonomian.

Pelaksanaan inisiatif strategis Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan rencana aksi diantaranya:

Periode	Rencana Aksi	Keterangan
Triwulan I	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait kegiatan Pengendalian Impor	❖ Penyampaian Nota Dinas Konfirmasi Kesiapan Kementerian/Lembaga Untuk Perubahan Lartas Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian dan Usulan Pelaksanaan Rakortas Tingkat Menteri terkait Perubahan Lartas Impor sesuai nota dinas nomor PI.02.02/15/D.III.M.EKON/02/2025. ❖ Penyampaian Nota Dinas Usulan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Mengenai Perubahan Ketentuan Larangan dan Pembatasan Impor dari Kementerian Perdagangan sesuai nota dinas nomor PI.02.02/11/D.III.M.EKON/02/2025.
	Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	Koordinasi Pembahasan Cyber Security Centre: ❖ Berdasarkan Undangan Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital No: PI.02.03/11/D.III.M.EKON/03/2025 pada 11 Maret 2025 Perihal Rapat Koordinasi Terkait Cyber Security Centre yang dilaksanakan pada 11 Maret 2025. Hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan Notula: KWU.06.02/03/D.III.M.EKON.5/03/2025; ❖ Berdasarkan Undangan Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital No: PI.04.02/13/D.III.M.EKON/03/2025 pada 26 Mei 2025 Perihal Undangan Rapat Lanjutan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Keamanan Siber di Indonesia yang dilaksanakan pada 26 Maret 2025; Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital: ❖ Berdasarkan Undangan Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.02/22/D.III.M.EKON.5/02/2025 pada 12 Februari 2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM di Bidang Ekonomi Digital. Hal ini ditindaklanjuti risalah rapat No: KWU.06.02/20.1/D.III.M.EKON.5/02/2025;

		❖ Koordinasi pengembangan SDM dibidang ekonomi digital juga ditindaklanjuti dengan melakukan pertemuan dengan pelaku usaha yang telah menyediakan pelatihan/upskilling/reskilling dibidang digital seperti IBM. Adapun hasil koordinasi ini tercantum dalam Nota Dinas KWU.06.01/15/D.III.M.EKON.5.1/03/2025
Triwulan II	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor	❖ Telah dilaksanakan serangkaian rapat koordinasi bilateral bersama KL mengenai pembahasan rencana aksi pada pilar 1: strategi penguatan infrastruktur konektivitas, layanan <i>backbone</i>, dan sarana penunjang Logistik; ❖ Per tanggal 19 Juni 2025, Renaksi RPerpres mencakup 22 program, 25 sasaran program, 92 kegiatan, dan 179 keluaran.
	Koordinasi High Level Meeting rekomendasi kebijakan terkait Standarisasi dan Pengawasan Perdagangan	❖ Penyelenggaraan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Putusan MA No. 6P/HUM/2024 terkait Permohonan Uji Materiil Terhadap Permendag No. 25 Tahun 2021 sesuai surat PI.04.04/05/D.III.M.EKON.02/03/2025; ❖ Penyampaian Laporan Hasil Koordinasi terkait Surat Hardianto Gosali kepada Menko Perekonomian tentang Pemeriksaan/Penyelidikan Dugaan Pelanggaran PT Trive Invest Futures (Pialang Berjangka); ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi terkait tindak lanjut surat Dewan Pengurus Pusat ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan) terkait SE Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 sesuai undangan nomor PI.04.02/16/D.III.M.EKON.2/06/2025; ❖ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Revisi Permendag No. 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia sesuai undangan nomor PI.04.06/13/D.III.M.EKON.2/05/2025; ❖ Penyelenggaraan Diskusi Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (terkait pendaftaran TPP SIR) sesuai undangan nomor PI.04.06/14/D.III.M.EKON.2/05/2025; ❖ Penyampaian Nota Dinas Bapak Deputy kepada Bapak Menko Melaporkan Hasil Audiensi

	dengan APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) terkait Perizinan di Ritel Modern. ❖
Koordinasi dan Monitoring High Level Meeting Kebijakan terkait pengembangan ekonomi digital dalam konteks infrastruktur, SDM, Iklim Usaha, Inovasi, dan Investasi	Koordinasi pembahasan <i>Cyber Security Centre</i> (lanjutan) ❖ Koordinasi berdasarkan Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/64 /D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 Perihal Undangan Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Keamanan Siber di Indonesia yang dilaksanakan pada 28 Mei 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula No:B/KWU.06.03/33/D.III.M.EKON.5/05/2025 pada 2 Juni 2025; ❖ Koordinasi berdasarkan undangan KWU.06.04/55/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 19 Mei 2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan Notula No:B/KWU.06.03/29/D.III.M.EKON.5/05/2025 pada 22 Mei 2025; Koordinasi dibidang Inovasi dan Investasi 1. Koordinasi pengembangan quantum safe Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/53/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 Perihal Workshop Quantum Safe yang dilaksanakan pada 27 Mei 2025. Hasil rapat ini ditindaklanjuti dengan Notula: B/KWU.06.03/35/D.III.M.EKON.5/06/2025 pada 10 Juni 2025; 2. Koordinasi pengembangan quantum computing Undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/52/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 15 Mei 2025 3. Koordinasi terkait sinkronisasi Satgas AI Komdigi dan Satgas Semikonduktor dan AI yang ditindaklanjuti dengan nota dinas Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.02/45/D.III.M.EKON.5/05/2025 pada 14 Mei 2025 Koordinasi Permasalahan Kemitraan Pengemudi Online dengan berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.04/65/D.III.M.EKON/06/2025. Hal ini ditindaklanjuti dengan penyampaian notula rapat No:T/KWU.06.04/38/D.III.M.EKON/06/2025 pada 12 Juni 2025 Koordinasi dukungan kehadiran UMK Binaan dalam FGD Evaluasi Video Edukasi untuk UMK: Perizinan, Perlindungan Konsumen, dan E-

		Commerce dengan berdasarkan undangan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No: KWU.06.02/43/D.III.M.EKON/04/2025 tertanggal 16 April 2025 Koordinasi dibidang infrastruktur terkait sinkronisasi program kerja infrastruktur ekonomi digital sebagaimana surat Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital No:KWU.06.01/67/D.III.M.EKON.5/06/2025 tertanggal 5 Juni 2025 Koordinasi dibidang SDM terkait Update Digital Skill Dashboard Project yang direncanakan untuk digabungkan dengan aplikasi digital talent Komdigi sebagaimana yang diselenggarakan pada 16 Mei 2025 dan ditindaklanjuti dengan nota dinas No: KWU.06.01/24.1/D.III.M.EKON.5/05/2025 tertanggal 17 Mei 2025
Triwulan III	Koordinasi High Level Meeting Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Laut, Darat, Udara dan Rel	Koordinasi High Level Meeting Evaluasi Standardisasi Fasilitas Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas dilaksanakan dengan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I pada tanggal 18 Juli 2025 dalam rangka pembahasan rumusan batang tubuh dan Rencana Aksi RPerpres Penguatan Logistik Nasional.
	Koordinasi High Level Meeting Rekomendasi Kebijakan terkait Perdagangan Ritel	Telah terlaksana dengan penyampaian Nota Dinas: ❖ Laporan Update Program GASPPoL (Gerakan ASN Pakai Produk Lokal) ❖ Laporan Persiapan <i>Kick Off Road to Harbolnas</i> (Hari Belanja Online Nasional) 2025 ❖ Penyampaian Draft Surat Peluncuran HARBOLNAS 2025 ❖ Laporan Hasil FGD Koordinasi Kebijakan Perpajakan Pusat dan Daerah pada Sektor Ritel
Triwulan IV	Monitoring Evaluasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan	Monitoring Evaluasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Penyederhanaan Prosedur Perdagangan dilaksanakan melalui pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang mana Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital diamanahkan sebagai Wakil Ketua I Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (<i>Debottlenecking</i>). Tim Satgas P2SP secara berkala mengadakan rapat koordinasi, termasuk pada triwulan IV.
	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan terkait dengan Stranas	Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan terkait dengan Stranas Literasi dan Inklusi Keuangan dilaksanakan melalui: ❖ Rapat Tindak Lanjut RPP Komnas LIK pada tanggal 5 Desember 2025.

Literasi dan Inklusi Keuangan

❖ Rapat Pembahasan Penguatan Program Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) secara daring pada tanggal 29 Desember 2025.

a. Hambatan dan Kendala IKU 4.1

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. IKU 1.1. Penurunan daya beli dan inflasi sektor konsumsi yang memperlambat pertumbuhan e-commerce. Ketidakpastian global melemahkan investasi startup dan inovasi digital, sementara infrastruktur internet dan data center yang terbatas serta biaya tinggi menghambat akses dan ekspansi sektor digital.
2. IKU 1.2. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB menghadapi sejumlah seperti kebijakan tarif AS yang dikhawatirkan menurunkan daya saing dan volume ekspor produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik serta mendorong fenomena *frontloading*. Selain itu, permintaan global melemah karena perlambatan di negara mitra dagang utama yang berpotensi menghambat laju ekspor secara keseluruhan.
3. IKU 1.3. Erosi daya beli masyarakat akibat kenaikan harga komoditas meskipun ada bantuan sosial. Selain itu, pergeseran konsumen ke e-commerce menantang perdagangan eceran konvensional dalam adaptasi dan persaingan harga di pasar digital.
4. IKU 2.1. Keterlambatan penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional yang mana didalamnya berisikan renaksi terkait konektivitas jalan dan perbaikan tata kelola layanan transportasi darat dan laut, karena proses birokrasi di K/L yang bertanggung jawab untuk melakukan paraf draf Perpres cukup lambat dan panjang.
5. IKU 2.2. Peningkatan arus barang pada akhir tahun menyebabkan kebutuhan ketersediaan jumlah armada transportasi dan tenaga kerja meningkat. Kedua, lamanya *dwelling time* pada proses pra-pelayanan (dokumen perizinan) dan peningkatan pemeriksaan fisik (*random check*) bongkar muat. Ketiga, keterlambatan penetapan RPerpres Penguatan Logistik Nasional karena proses birokrasi di K/L yang bertanggung jawab untuk melakukan paraf draf Perpres cukup lambat dan panjang.
6. IKU 3.1. Rendahnya literasi keuangan meskipun inklusi meningkat, sehingga banyak masyarakat belum bijak mengelola produk keuangan dan belum memanfaatkan produk non-bank seperti asuransi atau pasar modal. Kesenjangan inklusi juga terlihat antara perkotaan dan perdesaan, serta lemahnya sinergi program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

b. Upaya Perbaikan IKU 4.1

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, maka telah dilakukan beberapa upaya tindak lanjut:

1. IKU 1.1. Pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada platform digital yang utamakan penjualan UMKM lokal untuk mengurangi beban PPN 12%, serta mendorong investor institusi lokal agar menggantikan modal asing di tengah gejolak global. Selain itu, percepatan perluasan konektivitas broadband dan penguatan infrastruktur digital melalui kemitraan publik-swasta sangat penting untuk menurunkan biaya layanan dan mendukung pusat data nasional.
2. IKU 1.2. Melihat dinamika ekonomi dan geopolitik global yang memengaruhi ekspor, Pemerintah mempercepat Program Paket Ekonomi dan stimulus melalui pembentukan Pokja P2SP. Berbagai kebijakan diperkuat, termasuk pengembangan

bahan baku dalam negeri, insentif fiskal, proteksi impor, promosi perdagangan, serta percepatan negosiasi FTA/CEPA dan upaya akses ke OECD untuk memperluas akses pasar dan menurunkan tarif.

3. IKU 1.3. Mendorong program belanja nasional untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, ritel juga didorong untuk dapat lebih melibatkan produk UMKM dalam program belanja. Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui program pengembangan UMKM digital yang tersebar di berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya.
4. IKU 2.1. Sosialisasi kepada pelaku usaha, rapat koordinasi secara triwulanan, rapat koordinasi *high level meeting*, dan juga memastikan implementasi layanan pada setiap pelabuhan.
5. IKU 2.2. Optimalisasi sinkronisasi dan koordinasi lintas K/L perlu dilakukan untuk mempercepat pelayanan akhir tahun, termasuk pembahasan teknis di lapangan. Selain itu, koordinasi risk management diperlukan untuk mempercepat pemeriksaan fisik dan dokumen secara otomatis serta mengurangi intervensi manual. Monitoring berkala ke PIC K/L juga penting guna mempercepat proses paraf internal.
6. IKU 3.1. Optimalisasi edukasi, sosialisasi, dan literasi keuangan perlu ditingkatkan, termasuk program yang spesifik menyasar masyarakat desa sesuai kebutuhan lokal. Penguatan struktur DNKI menjadi komite nasional seperti diatur UU No.4 Tahun 2023 juga penting agar koordinasi lintas K/L dapat berjalan lebih sistematis dan terarah.



Sasaran Program 5

Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 114,33 (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Program 5 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3,43 (baik)	114,33%
Nilai Sasaran Strategis			114,33%	

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dalam mencapai sasaran program terwujudnya layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang perniagaan dan ekonomi digital yang berkualitas.

IKU 5.1

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital



Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas ditujukan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital. Pengukuran tingkat kepuasan pelayanan ini dilakukan dengan melaksanakan survei pelayanan melalui *google form* kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni, Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Pengukuran indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1)

Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian

$$= (\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5}) / 5$$

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital tercatat sebesar 3,43 atau mencapai 114,33 persen dari target Tahun 2025. Pada IKU 5.1 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital, target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 3 dari 4 (Baik) telah terpenuhi. Dengan demikian, capaian kinerja dari pengukuran indeks ini telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa Deputy Bidang Koordinasi Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital serta para pemangku kepentingan yang menerima layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan puas terhadap kualitas layanan yang diberikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian.

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital diperoleh dari rata-rata Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di unit: Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; Asisten Deputy Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor; Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional; Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital; serta Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan. Adapun Indeks Kepuasan Layanan pada masing-masing Asdep sebagai dasar perhitungan, yaitu:

Tabel 3.20
Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Asdep Tahun 2025

No	Unit Kerja Eselon II	Indeks Kepuasan Semester II
1	Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	3,59 (Puas)
2	Asisten Deputy Fasilitas Dalam Negeri dan Pengembangan Ekspor	3 (Puas)
3	Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional	3,35 (Puas)
4	Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Digital	3,63 (Puas)
5	Asisten Deputy Peningkatan Inklusi Keuangan	3,56 (Puas)
Rata-Rata		3,43 (Puas)

Pada triwulan IV tahun 2025, Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital diperoleh nilai rata-rata Indeks 3,43 (Puas) dengan jumlah responden di unit eselon II masing-masing sebanyak 30

orang yang tersebar di Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Google, IBM, Meta, Huawei, dan Microsoft.

Pelaksanaan inisiatif strategis Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diwujudkan dalam berbagai kegiatan rencana aksi diantaranya:

Periode	Rencana Aksi	Keterangan
Triwulan I	Memberikan Arahan Penyusunan Kuesioner Pengukuran Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Arahan Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputy bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
	Memberikan Arahan Pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Arahan pelaksanaan survei kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputy bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan II	Memberikan Arahan Pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Arahan pelaksanaan survei kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputy bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan III	Memberikan Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I	Arahan Tindak Lanjut Hasil Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilaksanakan melalui rapat pimpinan yang dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.
	Memberikan Arahan Persiapan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan	Arahan Penyusunan kuesioner pengukuran survei kepuasan layanan Deputy Bidang Koordinasi

	Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II	Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputi bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.
Triwulan IV	Memberikan Arahan Pelaksanaan Survei Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester II	Arahan pelaksanaan survei kepuasan layanan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Semester I telah dilakukan kepada setiap keasdepan di lingkup Deputi bahwa penyusunan kuesioner dilakukan secara daring agar lebih efektif dan efisien.

a. Hambatan dan Kendala IKU 5.1

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, seperti adanya pergantian atau pembaruan mitra kerja (pejabat/unit kerja) yang menjadi sasaran layanan koordinasi yang berpotensi mempengaruhi hasil survei.

b. Upaya Perbaikan IKU 5.1

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan IV tahun 2025, beberapa opsi upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu membuat daftar unit kerja beserta nama pejabat yang akan dijadikan responden lintas Asdep.



Sasaran Program 6

Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas.

Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 117,65 (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Program 6 Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital	Indeks	85%	100%	117,65%
Nilai Sasaran Strategis			117,65%	

Capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital Tahun 2025 dalam mencapai sasaran program terwujudnya tata kelola Deputy Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital yang berkualitas dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja.

IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital



Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital.

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian. Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital ditargetkan sebanyak 12 rencana aksi, sebagai berikut:

1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas/ZI (1 kegiatan pada triwulan IV);
2. Nilai SAKIP (2 kegiatan pada triwulan I, 1 kegiatan pada triwulan II, 1 kegiatan pada triwulan III, 2 kegiatan pada triwulan IV);
3. Tingkat Digitalisasi Arsip (1 kegiatan pada masing-masing triwulan I-IV).

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Ekonomi Digital:

% Pelaksanaan Renaksi RB

$$= \frac{(\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan})}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Target kinerja Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 adalah sebesar 85%. Adapun target Tahun 2025 adalah sebesar 85%. Hingga Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 117,65% dari target Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Pelaksanaan RB Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (2025)	Realisasi (2025)	% Kinerja
IKU 6.1. Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	Persentase	85%	100%	117,65% (Memuaskan)

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah sebesar 100% dari target 85% pada tahun 2026. Pemenuhan target menunjukkan Renaksi RB yang dilaksanakan telah memenuhi seluruh Renaksi RB yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.23
Rencana Aksi RB Tahun 2025

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja
Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi			Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026
			Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan RB Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital

Triwulan I			
No	Rencana Aksi	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	telah terlaksana Rapat Internal Lingkup Kedeputian III pembahasan persiapan penetapan perjanjian kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2025. selanjutnya, Draft penyusunan perjanjian kinerja Lingkup Kedeputian III Tahun 2025 dilaksanakan pada Triwulan II.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-I 2025.
3	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan melalui Nota Dinas dan Sosialisasi SRIKANDI.
Triwulan II			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan pada Triwulan-II 2025.
2	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Penguatan persiapan pengawasan kearsipan internal lingkup Kedeputian III dilakukan melalui pendampingan pengelolaan arsip aktif telah dilaksanakan bersama Biro Umum dan Sumber Daya Manusia dan diwakilkan oleh Sekretaris Deputi pada tanggal 27 Mei 2025.
Triwulan III			
1	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan-III 2025 telah dilaksanakan.
2	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI telah dilaksanakan dengan secara aktif surat keluar dilakukan melalui Srikandi.
Triwulan IV			
1	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja (TW IV)	Terlaksana	Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja (TW IV) telah dilaksanakan melalui dialog kinerja internal Deputi 3 yang dipimpin oleh Deputi pada 14 Oktober 2025.
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan telah dilaksanakan dan telah dilakukan pelaporan

			pada web Ekon-GO dan melalui Nota Dinas kepada Plt Kepala Biro MKKS.
3	Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah dilaksanakan dialog kinerja tanggal 8 Desember 2025.
4	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi SRIKANDI dilaksanakan pemanfaatan Pemanfaatan telah berupa aplikasi SRIKANDI untuk surat keluar dan masuk.

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital diakumulasi dari 3 (tiga) sub indikator yaitu, Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI), Nilai SAKIP, dan Tingkat Digitalisasi Arsip dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat Keberhasilan Zona Integritas

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Nomor NOMOR: PW.06.02/11/INS.M.EKON/01/2026 Tanggal 14 Januari 2026 hal Penyampaian Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI, ditetapkan nilai Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebesar 75,13 (nilai IKU sebesar 101,93%). Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, didukung dan diverifikasi eviden dan analisis substansi pelaksanaan di masing-masing unit kerja dengan tujuan untuk menilai tingkat pemenuhan indikator WBK/WBBM serta kualitas implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan. Nilai evaluasi merupakan nilai hasil penilaian TPI yang berasal dari Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI dengan nilai maksimal 100.

Nilai IKU adalah nilai yang berasal dari hasil perhitungan berdasarkan Manual IKU dengan nilai maksimal 120% serta memiliki ketentuan nilai minimum untuk masing-masing Nilai Komponen sebagai berikut:

- Nilai Pengungkit ZI dengan kriteria minimal 42,75
- Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria minimal 3,6
- Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5
- Nilai Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2.

2. Nilai SAKIP

Berdasarkan Permenko Nomor 15 Tahun 2022 sebagaimana diubah pada Permenko Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Inspektorat telah melaksanakan Evaluasi AKIP di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital melalui Nota Dinas Inspektorat Nomor PW.04.01/203/INS.M.EKON/12/2025 Tanggal 1 Desember 2025 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I.

Komponen dan bobot penilaian atas implementasi SAKIP terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)
3.	Pelaporan Kinerja	20%	a. Keberadaan (4%) b. Kualitas (6%) c. Pemanfaatan (10%)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	a. Keberadaan (4%) b. Kualitas (6%) c. Pemanfaatan (10%)
	Total	100%	

Berdasarkan catatan Inspektorat, Evaluasi AKIP untuk komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan terhadap implementasi SAKIP sampai dengan pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 sedangkan komponen Pelaporan Kinerja dilakukan terhadap implementasi SAKIP di Tahun 2024. Perbaikan atas implementasi SAKIP yang telah dan sedang dilaksanakan selama masa evaluasi tetap diapresiasi sebagai bentuk peningkatan implementasi SAKIP dan agar dapat dipertahankan di periode mendatang.

Metodologi evaluasi menggunakan kombinasi kualitatif dan kuantitatif serta teknik evaluasi yang digunakan untuk memenuhi tujuan evaluasi antara lain telaah, survei, verifikasi data, metode statistik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, dan wawancara. Pendalaman evaluasi AKIP dilakukan dengan mengembangkan kriteria-kriteria tambahan yang tercermin dalam kertas kerja evaluasi tambahan untuk mengkuantifikasikan kriteria yang sudah ada.

Pendalaman evaluasi AKIP yang dilakukan dalam rangka menilai kualitas dari implementasi SAKIP di unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas semua komponen dilakukan pendalaman dengan meminta konfirmasi kepada Tim Pengelola Kinerja Tingkat Eselon I untuk memastikan informasi dalam data dukung dan mengetahui pemanfaatan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja AKIP.
2. Evaluasi atas pemanfaatan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja AKIP Tingkat Eselon I dilakukan pendalaman dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh Pejabat dan Pegawai di masing-masing unit kerja.
3. Evaluasi atas pemenuhan kriteria SMART tidak terbatas pada Perjanjian Kinerja (PK), namun juga sampai ke Manual IKU dan Rencana Aksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PK.
4. Evaluasi atas pemenuhan kriteria SMART tidak terbatas pada IKU Tingkat Eselon I, namun juga sampai ke 1 tingkat di bawahnya.
5. Evaluasi dilakukan secara detail dengan membangun kriteria-kriteria spesifik tertentu (kualitatif dan kuantitatif) yang harus dipenuhi untuk memperoleh sebuah penilaian yang objektif atas: a. Dokumen perencanaan, baik PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi b. Dokumen pengukuran kinerja berupa Laporan Kinerja Triwulanan c. Dokumen pelaporan berupa Laporan Kinerja Tahunan d. Dokumen lain yang relevan.
6. Evaluasi atas pemenuhan kriteria cascading tidak terbatas pada Level Eselon I dan Eselon II, namun sampai ke level individu.
7. Evaluasi atas pemenuhan kriteria terkait data kinerja telah relevan dan mendukung capaian kinerja dilakukan sampai dengan level Eselon II hingga ke

pemeriksaan detail ke dokumen pendukung atas capaian kinerja dan rencana aksi.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2024 memperoleh nilai 77,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.25
Hasil Evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,71
2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,16
3.	Pelaporan Kinerja	20%	13,48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20%	13,95
Total Nilai			77,30

Nilai tersebut mendapat predikat “BB” atau “Sangat Baik” dengan interpretasi 77,30 bahwa terdapat gambaran akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan bukan hanya di level Eselon I.

3. Tingkat Digitalisasi Arsip

Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor TU.04/1/SES.M.EKON/01/2026 Tanggal 8 Januari 2026 hal Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pengawasan kearsipan internal terhadap 35 (tiga puluh lima) unit pengolah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 31 Tahun 2025 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025. Hasil pengawasan kearsipan internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yakni Unit Pengolah Kearsipan Lama dan Unit Pengolah Kearsipan Baru.

Unit kerja di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memperoleh predikat sebagai berikut:

Tabel 3.26
Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Nilai	Predikat
1	Sekretariat Deputi	96,50	AA (Sangat Memuaskan)
2	Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga	92,63	AA (Sangat Memuaskan)
3	Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspo	93,78	AA (Sangat Memuaskan)
4	Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	93,43	AA (Sangat Memuaskan)
5	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital	94,18	AA (Sangat Memuaskan)
6	Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan	98,53	AA (Sangat Memuaskan)

a. Kendala dan Hambatan IKU 6.1

Pada Triwulan IV Tahun 2025, walaupun semua renaksi sudah dapat dilaksanakan, namun terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu aplikasi SRIKANDI yang sering tidak merespon/respon lama sehingga mengganggu aktivitas pemrosesan surat.

b. Upaya Perbaikan IKU 6.1

Berdasarkan kendala tersebut, beberapa upaya yang dilakukan seperti melakukan pemrosesan surat melalui media komunikasi lain seperti e-mail maupun aplikasi pesan elektronik lainnya. Kemudian memitigasi tugas mendadak dengan sosialisasi aplikasi Srikandi di gawai pegawai, sehingga notifikasi disposisi dapat segera disampaikan.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Pagu Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp21.800.000.000,- dengan jumlah blokir Rp14.198.493.000 sehingga memiliki anggaran setelah diblokir sebesar Rp7.601.507.000. Berdasarkan data dari SPAN Kemenkeu, realisasi anggaran tahun 2025 tercatat sebesar 99,95%.

3.3.2. Keselarasan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja

Dukungan anggaran yang diterima oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital selama Tahun 2025 sebesar Rp7.601.507.000,- (tujuh miliar enam ratus satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah) didistribusikan dalam 6 (enam) kegiatan. Pagu dan realisasi anggaran setiap kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.27
Pagu dan Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	1.773.139.000	1.772.793.494	99,98
2	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	739.508.000	739.238.786	99,96
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	1.045.055.000	1.044.868.561	99,98
4	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	945.116.000	945.109.640	100
5	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	1.342.928.000	1.342.826.515	99,99
6	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	1.755.761.000	1.752.866.282	99,84

3.3.3. Capaian Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja anggaran adalah atas evaluasi kinerja anggaran aspek implementasi. Evaluasi aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Pengukuran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun pengukuran capaian output program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIO P_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^T$$

Keterangan:

COP : Capaian Output Program tingkat unit eselon I

RIOP_j : Realisasi Indikator Output Program j

TIO P_j : Target Indikator Output Program j

l : jumlah program pada suatu unit eselon I

m : jumlah Output Program suatu program

n : jumlah indikator suatu Output Program

Pengukuran capaian output program Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.28
Capaian Output Program

No.	Kegiatan	TIOPj	RIOPj	COP
1	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	3	3	100%
2	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	4	4	100%
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	2	2	100%
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	4	5	120%
5	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	1	1	100%
Total		14	15	104%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator output program sejumlah 17 telah terealisasi semua sehingga capaian output program pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sebesar 100%.

3.3.4. Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan Keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Pelaksanaan analisis efisiensi keuangan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{op}	:	Efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
$AA \text{ Program}_i$	:	Alokasi anggaran program i

RA Program _i	:	Target Volume Keluaran (output) Kegiatan
COP _i		Capaian Output Program i
n	:	jumlah program pada suatu unit eselon I

Dari hasil perhitungan Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan pada bagian sebelumnya, tingkat efisiensi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dalam pencapaian kinerja di Tahun 2025 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.29
Analisis Efisiensi Keuangan

N o	Indikator Kinerja Utama	COP per Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
1	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Digital	100%	1.773.139.000	1.772.793.494	1.773.139.000	345.506
2	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	100%	739.508.000	739.238.786	739.508.000	269.214
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	100%	1.045.055.000	1.044.868.561	1.045.055.000	186.439
4	Koordinasi Kebijakan Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor	100%	945.116.000	945.109.640	945.116.000	6.360
5	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Inklusi Keuangan	100%	1.342.928.000	1.342.826.515	1.342.928.000	101.485
6	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	100%	1.755.761.000	1.752.866.282	1.755.761.000	2.894.718
Total			7.601.507.000	7.597.703.278	7.601.507.000	3.803.722
Efisiensi						0,05%

Berdasarkan data yang ada, capaian efisiensi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 menurut aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebesar 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target atas setiap keluaran (output) yang diperjanjikan dengan mengoptimalkan besaran pagu anggaran yang tersedia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah menerapkan langkah-langkah efisiensi keuangan dilakukan dalam bentuk realokasi anggaran seperti refocusing, revisi petunjuk operasional kegiatan dan sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan juga dilakukan agar menggunakan anggaran secara efisien. Pelaksanaan rapat koordinasi jika memungkinkan diupayakan secara daring melalui *video conference*. Berbagai langkah tersebut dilakukan agar tujuan kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal dengan anggaran yang efisien.

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari data penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA yang didasarkan pada hasil realisasi SP2D dalam aplikasi OM SPAN dan capaian output yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah output yang terkonfirmasi dengan output yang ditargetkan. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian kinerja keluaran (output) yang masing-masing diberikan bobot 50% (lima puluh perseratus) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (\% \text{ penyerapan anggaran} \times 50\%) + (\% \text{ pencapaian keluaran} \times 50\%)$$

Keterangan

$$\% \text{ Penyerapan anggaran} = (\text{realisasi penyerapan belanja} : \text{pagu belanja}) \times 100\%$$

$$\% \text{ Pencapaian keluaran} = (\text{realisasi keluaran} : \text{target keluaran}) \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada tahun 2025 tercatat sebesar 99,95% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.30
Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Komponen	Realisasi	Bobot	Nilai
1	Penyerapan Anggaran	99,95%	50%	49,97%
2	Pencapaian Keluaran (1 layanan)	100%	50%	50%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				99,97%

Monitoring pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala melalui berbagai kesempatan seperti rapat internal maupun dialog kinerja. Proses monitoring tersebut untuk memastikan realisasi anggaran berjalan dengan baik dalam mendukung pencapaian kinerja.

3.3.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pemerintah terus berusaha melakukan optimalisasi APBN melalui program-program strategis, sehingga pada awal tahun 2025 melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, dari

total pagu awal, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami pemblokiran yang mempengaruhi alokasi ke setiap unit kerja. Dengan keterbatasan yang ada, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berupaya untuk terus melakukan upaya menciptakan efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja. Sepanjang tahun 2025, upaya efisiensi sumber daya yang telah dilakukan diantaranya:

❖ **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pelaksanaan tugas pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan teknologi tersebut membuat penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efisien dalam berbagai hal. Beberapa teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut diantaranya seperti layanan whatsapp, online meeting, dan fasilitas cloud.

Gambar 3.13
Efisiensi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi



Kegiatan komunikasi koordinasi antar staf internal maupun Kementerian/Lembaga lain Pola komunikasi pegawai sangat terbantu dengan adanya layanan whatsapp yang juga menyediakan fitur pengiriman file soft copy. Pelaksanaan rapat lebih fleksibel dilaksanakan dengan adanya fasilitas online meeting seperti zoom. Penyimpanan file juga tidak terlalu mengandalkan hardware dengan adanya fasilitas cloud seperti google drive, onedrive, dan dropbox. Penggunaan berbagai TIK tersebut mempercepat proses digitalisasi sehingga mengurangi penggunaan kertas cetak. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK tidak hanya membuat efisiensi sumber daya tetapi juga mendukung program ramah lingkungan dengan mengurangi limbah kertas.

❖ **Kerja Sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional**

Tugas koordinasi kebijakan mensyaratkan perlunya analisis mendalam terhadap isu atau permasalahan terkait perniagaan dan ekonomi digital. Dengan menjalin kerja sama dengan dengan berbagai lembaga internasional, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital mendapatkan berbagai manfaat mulai dari *knowledge transfer* terkait *best practice* dari luar negeri maupun pengetahuan terkait perangkat analisis kebijakan. Lembaga internasional juga memberikan dukungan personel dan dukungan finansial sehingga mengurangi beban keuangan terhadap APBN.

Kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional telah dijalin sejak beberapa tahun yang lalu dan terus dipertahankan hingga saat ini. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah menjalin kerja sama dengan lembaga seperti Asian Development Bank, World Bank, dan pihak swasta seperti Google dan Huawei.

Gambar 3.16
Efisiensi Melalui Kerja Sama dengan Lembaga Internasional



Berbagai kerja sama tersebut membantu menciptakan efisiensi sumber daya sehingga pelaksanaan tugas dapat diselesaikan dengan baik tanpa membebani APBN. Bentuk kerja sama serta estimasi nilai efisiensi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.32
Estimasi Efisiensi Sumber Daya

No	Lembaga	Bentuk Kerja Sama	Estimasi Efisiensi
1	Asian Development Bank	❖ Dukungan penyusunan Kajian Strategi Efisiensi Logistik untuk Mendukung Penguatan Ekspor dari Wilayah Timur Indonesia	Rp100.000.000,-
2	World Bank	❖ Dukungan jasa konsultasi penyusunan indikator Dashboard Kinerja Logistik Nasional sebagai instrumen pemantauan, evaluasi dan pengambilan kebijakan berbasis data	Rp100.000.000,-
3	Google	❖ Pembelajaran AI (<i>Artificial Intelligence</i>) dari global: <i>Benchmarking</i> pilihan kebijakan, prinsip dan dukungan kebijakan AI ❖ Pelatihan AI Essentials dan Google Prompting Essentials	Rp170.000.000,-

No	Lembaga	Bentuk Kerja Sama	Estimasi Efisiensi
4	Huawei	❖ Seminar Kit pada booth Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi)	Rp17.000.000,-
5	IBM	❖ Berkontribusi dalam penyediaan narasumber pada kegiatan <i>Workshop Quantum Computing dan Quantum Safe</i> ❖ Berkontribusi dalam penyediaan narasumber pada kegiatan Pelatihan Gig Economy tanggal 19 Desember 2025	Rp47.017.500
6	Meta	Berkontribusi dalam penyediaan narasumber pada kegiatan Pelatihan Gig Economy tanggal 19 Desember 2025	Rp2.000.000
7	Salesforce	Berkontribusi dalam penyediaan narasumber pada kegiatan Pelatihan Gig Economy tanggal 19 Desember 2025	Rp1.000.000
Jumlah			Rp437.017.500,-

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Digital c.q Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional bekerja sama dengan ADB melalui dana Hibah dalam rangka penyusunan Kajian Strategi Efisiensi Logistik untuk Mendukung Penguatan Ekspor dari Wilayah Timur Indonesia. Kajian ini memanfaatkan pembelajaran dari studi sebelumnya serta pemetaan komoditas unggulan wilayah timur sebagai basis muatan balik, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif, berorientasi pasar, dan mendukung peningkatan efisiensi logistik serta daya saing ekspor.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Digital c.q Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional mendapatkan jasa konsultasi dari World bank dalam penyusunan indikator pengembangan *Dashboard* Kinerja Logistik Nasional sebagai instrumen pemantauan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Dashboard ini akan dikembangkan secara bertahap. Tahap pertama akan berfokus pada implementasi indikator internasional, dengan tujuan membangun kerangka dasar sistem pemantauan yang kompatibel dengan metodologi global. Tahap kedua akan dikembangkan indikator domestik yang disesuaikan dengan konteks nasional, mencakup aspek infrastruktur, pelayanan, biaya, serta efisiensi rantai pasok di berbagai wilayah Indonesia.

Adapun Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Digital c.q Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital bekerja sama dengan Google dalam rangka pembelajaran AI (*Artificial Intelligence*) dari global: *Benchmarking* pilihan kebijakan, prinsip dan dukungan kebijakan AI dan Pelatihan AI Essentials dan Google Prompting

Essentials. Selain itu, kerja sama dengan Huawei dalam pelaksanaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi) berupa Seminar Kit untuk peserta pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan begitu, total estimasi efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital sepanjang tahun 2025 yaitu Rp387.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).



BAB IV

EVALUASI KINERJA



Deputi III
Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital

BAB IV

EVALUASI KINERJA

4.1. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

4.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital 2025-2029 merupakan pedoman penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya dan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, Renstra Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital juga disusun sesuai dengan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan RPJMN 2025-2029 dan bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan, agenda, dan misi pembangunan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) termasuk pada Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital yang sebelumnya adalah Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri. Dalam renstra 2025-2029, Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta angka target. Dalam perkembangannya, proses penyesuaian terus dilakukan pada tahun berjalan agar sasaran program, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, dan Relevant). Secara umum, matrik evaluasi renstra Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital pada tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.1 .

Tabel 4.1
Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Program			Target					Evaluasi
				2025	2026	2027	2028	2029	
Perspektif Stakeholder									
SP.1 Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan									
Indikator Kinerja:								Masih sejalan. Namun untuk IKU 1.1, sampai dengan Triwulan IV 2025, formula perhitungan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB (target 8–9%) masih dirumuskan antar K/L terkait (BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, Komdigi, serta Prospera). Diperlukan percepatan koordinasi perumusan formulasi pada Tahun 2026	
1.1	Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB			8-9%	9-10%	10-11%	11-12%		12-13%
1.2	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB			21,7%	21,9%	22,0%	22,2 %		22,6 %
1.3	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB			13,07%	13,07%	13,07%	13,07 %		13,07 %
SP.2 Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas									
Indikator Kinerja:								Masih sejalan	
2.1	Biaya Transportasi terhadap PDB	Logistik	8,27%	8,09%	7,91%	7,74 %	7,56 %		
2.2	Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan		1,7 hari	1,6 hari	1,5 hari	1,4 hari	1,2 hari		
SP.3 Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan									
Indikator Kinerja:								Masih sejalan	
3.1	Indeks Literasi Keuangan			57,25	60,27	63,30	66,32		69,35
SP.4 Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas									
Indikator Kinerja:								Masih sejalan	
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		3 dari 4
SP.5 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas									
Indikator Kinerja:								Masih sejalan	
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital			3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4		3 dari 4
SP.6 Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas									
Indikator Kinerja:								Masih sejalan	
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital			85%	85%	85%	85%		85%

4.1.2. Perjanjian Kinerja

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 mengamanatkan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital bertugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga di bidang perniagaan dan ekonomi digital. Dalam rangka memperbaiki perencanaan kinerja pada tahun 2026, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah melakukan evaluasi dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.2
Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Evaluasi
1	Sasaran Program 1			
	Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	Sasaran Program diubah menjadi Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional		
	IKU 1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9%	8-9%*	Penambahan IKU baru untuk menegaskan program unggulan kementerian.
	IKU 1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,7%	23,64% *	Masih sejalan dengan matrik pembangunan RPJMN yang mencerminkan tupoksi pengembangan ekspor.
	IKU 1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%	13,22%*	Penambahan IKU baru untuk menegaskan program unggulan kementerian.
2	Sasaran Program 2			
	Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang Berkualitas	Sasaran Program diubah menjadi Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas		
	IKU 2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,27%	10,26%*	Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk dapat menurunkan persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto sesuai target dalam dokumen perencanaan nasional serta peningkatan kinerja logistik nasional dalam indikator kinerja logistik global.
	IKU 2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,7 hari	1,22 hari	Realisasi rata-rata waktu perputaran di pelabuhan memenuhi target.
3	Sasaran Program 3			
	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan			

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Evaluasi
	IKU 3.1 Indeks Literasi Keuangan	57,25	66,64	Realisasi indeks literasi keuangan memenuhi target.
4	Sasaran Program 4 Terwujudnya Kebijakan Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas			
	IKU 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3	Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital memenuhi target.
5	Sasaran Program 5 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas			
	IKU 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital	3 dari 4	3,43	Realisasi indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dan ekonomi digital memenuhi target.
6	Sasaran Program 6 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perdagangan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas			
	IKU 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Ekonomi Digital	85%	100%	Target tahun 2026 disesuaikan menjadi 92%.

Sesuai dengan hasil evaluasi perjanjian kinerja pada tahun 2025 di atas maka perjanjian kinerja dan rencana aksi pada tahun 2026 diusulkan untuk diubah menjadi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perjanjian Kinerja 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Daya Saing Perdagangan dan Ekonomi Digital	1.1 Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	9-10%

	yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	1.2 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB	21,9%
		1.3 Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDB	13,07%
		1.4 Persentase Penyelesaian Inisiasi <i>Gig Economy</i>	60%
		1.5 Persentase Efektivitas Program Belanja Dalam Negeri	100%
2	Terwujudnya Penguatan Logistik Nasional yang Berkualitas	2.1 Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB	8,09%
		2.2 Rata-rata Waktu Perputaran di Pelabuhan	1,6 hari
3	Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	Indeks Literasi Keuangan	60,27
4	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	Indeks Efektivitas, Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4
5	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital	3 dari 4
6	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital	92%

4.1.3. Evaluasi Unit Kerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2025-2029, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merumuskan 9 (sembilan) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

Salah satu bentuk perencanaan kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital adalah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kebijakan bidang koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang berkualitas serta penata kelolaan yang baik. Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator target kinerja secara berkala dan dievaluasi tiap akhir tahun. Secara umum, matriks evaluasi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Akuntabilitas Kinerja Internal pada Unit Kerja di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.4 Matriks Evaluasi Unit Kerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Sesdep	A1	A2	A3	A4	A5
1	PERENCANAAN KINERJA	30						
1.a	Dok. Perencanaan Kinerja telah tersedia	6						
1	Terdapat dok. perencanaan kinerja jangka pendek		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Terdapat dok. perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Terdapat dok. perencanaan anggaran yang mendukung kinerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
1.b	Dok. Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9						
1	Dok. Perencanaan Kinerja telah diformalkan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

2	Dok.Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dok. Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Terdapat perbaikan /penyempurnaan dok. Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	Kinerja individu telah selaras dengan kinerja organisasi		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	PENGUKURAN KINERJA	30						
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6						
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9						
1	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

	capaian kinerja yang diharapkan						
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15					
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian Reward and Punishment	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

3	PELAPORAN KINERJA	15						
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.b	telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan nya	4.5						
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional /internasional(Benchmark Kinerja)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan detail kinerja dalam		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

	keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja						
9	Dok. Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.5					
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25					
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	12.5					

1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Sumber Daya yang memadai	12.5					
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan dilaksanakan pada seluruh level eselon II (asdep/kabiro)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

4.1.4. Evaluasi SAKIP KEMENPAN-RB/INSPEKTORAT

Definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP tersebut.

Berdasarkan Laporan Inspektorat Kemenko Perekonomian Nomor PW.04.01/39/INS.M.EKON/11/2025 tanggal 28 November 2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025, Inspektorat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2025 dengan tujuan antara lain: a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b) Menilai tingkat implementasi SAKIP; c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025 oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperoleh nilai total sebesar 77,30 dengan kategori BB (Sangat Baik) dengan komponen dan bobot penilaian sebagai berikut:

Tabel 4.5 Komponen dan Bobot Penilaian Inspektorat

No	Komponen	Sub. Komponen	Bobot	Total Nilai
1	Perencanaan Kinerja	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)	30%	26,71

2	Pengukuran Kinerja	a. Keberadaan (6%) b. Kualitas (9%) c. Pemanfaatan (15%)	30%	23,16
3	Pelaporan Kinerja	a. Keberadaan (4%) b. Kualitas (6%) c. Pemanfaatan (10%)	20%	13,48
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a. Keberadaan (4%) b. Kualitas (6%) c. Pemanfaatan (10%)	20%	13,95
	Total		100%	77,30

Nilai 77,30 dengan predikat “BB” atau “Sangat Baik” tersebut diinterpretasikan bahwa terdapat gambaran akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan bukan hanya di level Eselon I. Berikut merupakan nilai hasil AKIP Tahun 2025 per komponen:

Tabel 4.6 Perencanaan Kinerja

No	Uraian	Nilai
I	Keberadaan (6%)	4,50
II	Kualitas (9%)	8,06
III	Pemanfaatan (15%)	14,15
Perencanaan Kinerja (30%)		26,71

Tabel 4.7 Pengukuran Kinerja

No	Uraian	Nilai
I	Keberadaan (6%)	5,71
II	Kualitas (9%)	6,57
III	Pemanfaatan (15%)	10,88
Pengukuran Kinerja (30%)		23,16

Tabel 4.8 Pelaporan Kinerja

No	Uraian	Nilai
I	Keberadaan (4%)	3,20

II	Kualitas (6%)	5,36
III	Pemanfaatan (10%)	4,92
Pelaporan Kinerja (20%)		13,48

Tabel 4.9 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Uraian	Nilai
I	Keberadaan (4%)	2,77
II	Kualitas (6%)	2,84
III	Pemanfaatan (10%)	8,34
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%)		13,95

Inspektorat Kemenko Perekonomian memberikan beberapa rekomendasi dalam rangka menyempurnakan implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Rekomendasi tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025-2029 belum disusun sehingga tidak dapat dipublikasikan pada laman kinerja.ekon.go.id.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja jangka pendek berupa Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 untuk masing-masing kode kegiatan belum ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- 3) Dokumen Perencanaan Anggaran dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah disusun tetapi belum menjelaskan keterkaitan kegiatan, anggaran, dan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja (PK).
- 4) Dokumen dasar penetapan target perjanjian kinerja telah didukung dengan pertimbangan yang terdokumentasi dengan baik tetapi belum didukung dengan kertas kerja perhitungan dan belum memberikan penjelasan bagi seluruh IKU sampai dengan level eselon II.

B. Pengukuran Kinerja

- 1) Belum terdapat kebijakan/peraturan yang mengatur terkait mekanisme pengumpulan data kinerja oleh KPI Manager di masing-masing unit kerja level eselon I.
- 2) Terdapat definisi dan cara mengukur indikator kinerja yang belum sesuai dalam Manual IKU.

- 3) Setiap level organisasi perlu melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan semua pegawai perlu menyampaikan SKP.
- 4) Belum terdapat pemberian *reward and punishment* yang berdasarkan pada pengukuran (capaian) kinerja.
- 5) Pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

- 1) Berdasarkan laman kinerja.ekon.go.id diketahui bahwa belum dilaksanakan revidi atas Laporan Kinerja Triwulanan.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk seluruh IKU.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja untuk seluruh IKU.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya untuk seluruh IKU.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja Tahunan belum menginformasikan upaya efisiensi yang telah diquantifikasikan atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk seluruh IKU.
- 6) Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 7) Informasi dalam Laporan Kinerja Tahunan belum seluruhnya dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dan dasar penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Belum ditetapkan kebijakan/peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan evaluasi kinerja internal di unit kerja.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang tetapi belum pada seluruh unit kerja level eselon II.
- 3) Dasar pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum didukung dengan Surat Tugas Evaluasi yang ditandatangani oleh pimpinan.
- 4) Kertas Kerja dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal hanya disusun oleh satu unit kerja level eselon II serta belum menggambarkan hasil evaluasi terkait hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Sehubungan dengan hasil penilaian SAKIP diatas, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital telah melaksanakan dialog kinerja secara berkala pada tahun 2025. Sebagai upaya untuk menunjukkan keterlibatan pimpinan, rapat dipimpin langsung oleh Bapak Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi

Digital serta dihadiri oleh para Asisten Deputi dan seluruh pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital. Dialog Kinerja tersebut dilaksanakan untuk membahas evaluasi SAKIP beserta penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (PK) Tahun 2026 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025.

Gambar 4.1
Dialog Kinerja Penyusunan PK dan LAKIP



Gambar 4.2
Dialog Kinerja Evaluasi Capaian Kinerja Deputi III



Gambar 4.2
Dialog Kinerja terkait Isu Strategis Kedeputan





Pelaksanaan dialog kinerja menunjukkan bagaimana pimpinan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital memiliki kepedulian tinggi terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil dalam rapat tersebut dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital di masa mendatang. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital secara khusus memberikan arahan kepada segenap pegawai untuk melakukan evaluasi atas kinerja tahun lalu dan melakukan perbaikan dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar dan berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.

Beberapa poin sebagai langkah tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat diantaranya:

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025-2029 disahkan melalui Surat Keputusan Deputy pada akhir tahun 2025 atau 2 (dua) bulan setelah diundangkannya Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran (TA) 2026 akan dilakukan revisi pada pertengahan tahun.
3. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) TA 2026 menjelaskan keterkaitan kegiatan dan anggaran.
4. Dokumen kertas kerja perhitungan beserta penjelasan bagi seluruh IKU sampai dengan level eselon II akan dilakukan pada TA 2026.
5. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja yang sesuai arahan dari KemenpanRB dan Biro Perencanaan yaitu IKU Stakeholder pada level eselon II harus merupakan penjenjangan dari IKU eselon I, sebagaimana amanat Permenpan 89/2022 tentang penjenjangan kinerja instansi.
6. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dilakukan dengan memenuhi standar yang baik yaitu berkualitas *outcome* atau *output* penting, sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta ukuran keberhasilan (indikator kinerja utama/IKU) memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, dan Timebound*) dan didukung dengan dokumen penetapan target, rencana aksi, dan manual IKU yang memadai.
7. Peningkatan pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja melalui internalisasi mekanisme pengelolaan kinerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja di unit kerja.
8. Penyusunan SOP pemberian *reward & punishment* untuk pegawai dilakukan oleh Biro HO, pada tahun 2026 agar unit Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital dapat menerapkan SOP tersebut.
9. Penyesuaian pada rencana aksi dan manual indikator kinerja utama sesuai masukan Inspektorat dan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.
10. Penyusunan SKP 2023 seluruh pegawai dengan aplikasi e-kinerja secara tepat waktu.
11. Penyusunan perjanjian kinerja hingga ke level staf.
12. Penyusunan tim kerja menggambarkan program dan kegiatan lintas unit kerja (*cross-cutting*).

- 
13. Penjelasan langkah nyata efisiensi sumber daya dan efisiensi anggaran dalam laporan kinerja.
 14. Implementasi SAKIP yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran serta pelaporan rutin progres kinerja kepada pimpinan perlu didokumentasikan dengan baik.
 15. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja triwulanan yang telah dilakukan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja berikutnya.
 16. Menyusun Laporan Kinerja yang memuat informasi terkait upaya nyata dan/atau hambatan dalam mencapai target kinerja serta memperkuat narasi terkait peran dalam pencapaian kinerja.
 17. Laporan Kinerja Eselon 2 perlu memuat hambatan dan kendala, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan baik secara substansial maupun kinerja unit kerja.

Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya sekaligus sebagai saran evaluasi akuntabilitas kinerja.

4.2. RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan penilaian dan peninjauan ulang dari sisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihan atas kinerja organisasi pada periode sebelumnya. Memperhatikan analisis capaian kinerja pada tahun 2025, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital merumuskan rencana aksi peningkatan kinerja untuk tahun 2026 sebagai berikut:

a. Menggerakkan Perubahan Melalui Kepemimpinan

Peran seorang pimpinan sangat diperlukan dalam berbagai kondisi organisasi terutama untuk mencapai tujuan perubahan yang diharapkan. Untuk mewujudkan pemimpin yang berkomitmen terhadap pengelolaan kinerja, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- ❖ Melaksanakan dialog kinerja organisasi untuk membahas Indikator Kinerja, penetapan target, dan Rencana Aksi untuk Tahun 2025.
- ❖ Melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja di hadapan Menteri.
- ❖ Melaksanakan rapat kinerja rutin triwulanan untuk membahas capaian IKU dan isu-isu strategis organisasi.

b. Menerjemahkan Strategi Kepada Kerangka Organisasi. Untuk memberikan pemahaman mengenai strategi organisasi kepada seluruh pegawai, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- ❖ Mengadakan forum pertemuan dengan seluruh pegawai dalam rangka pemberian pemahaman terkait strategi organisasi (visi/misi dan indikator kinerja).
- ❖ Mengadakan forum pertemuan dengan seluruh pegawai untuk mengkomunikasikan tujuan dibutuhkannya perubahan/perbaikan organisasi sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari KemenpanRB dan Inspektorat.

c. Menjadikan Capaian Strategi Organisasi Sebagai Tugas Setiap Pegawai untuk memotivasi pegawai agar berkinerja baik sesuai tugasnya, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- ❖ Pimpinan secara langsung mengarahkan pekerjaan pegawainya agar selaras antara target individu dengan target organisasi.
- ❖ Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pegawai yang berkinerja dengan baik secara berkesinambungan .
- ❖ Pimpinan mengarahkan para pegawai untuk membangun atau menumbuhkembangkan inovasi dan ide-ide yang dapat meningkatkan kinerja masing-masing unit.
- ❖ Pengembangan kompetensi pegawai melalui bimtek, diklat, ataupun *knowledge sharing* seperti yang rutin diadakan oleh Agen Perubahan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.



BAB V

PENUTUP



2025

Deputi III

Deputi Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Ekonomi Digital



BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital disusun sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital berisi capaian atas target-target kinerja, hambatan, serta strategi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja agar dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital tercatat sebesar 108,59%, dengan kategori “memenuhi ekspektasi”. Kinerja tersebut didukung dengan capaian realisasi anggaran di tahun 2025 sebesar 99,95% dari total pagu anggaran dan efisiensi keuangan sebesar 0,01%.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang difokuskan pada peningkatan daya saing di bidang perniagaan dan industri, meliputi: (1) perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, dan tertib niaga; (2) fasilitasi perdagangan dan pengembangan ekspor; (3) pengembangan logistik nasional; (4) pengembangan ekonomi digital; (5) peningkatan inklusi keuangan.

Kesinambungan kegiatan (*continuous improvement*) dan keterkaitan (*cross-section*) dalam capaian kinerja dari tahun ke tahun sangat penting untuk mengukur dampak dari kebijakan yang telah dihasilkan, apakah ada manfaatnya atau tidak bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dampak dari kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian, khususnya Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital.

2. Harapan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan perniagaan dan industri yang lebih baik. Laporan Kinerja juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital yang akan berdampak positif dalam rangka mewujudkan dukungan teknis, pelayanan, dan administrasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang optimal.